

# TokohINDONESIA<sup>®</sup>



COM

Edisi 43 | Desember 2016

TOKOH.ID  
**SOSOK POLITISI  
KEBANGSAAN**

NEWS REVIEW:

\* Empat Pilar Tak Ubah  
Kedudukan Pancasila

\* Metoda Kreatif  
Sosialisasi 4 Pilar

PEDULI:

\* SMA Kebangsaan

\* Karpas Merah  
Rakyat Miskin

FAMILY:

Harmonis dan  
Panutan Keluarga

PERSPEKTIF:

\* Bersatu, Bersatu  
dan Bersatu

\* Kita Butuh  
Haluan Negara



**ZULKIFLI HASAN**

**M P R**

**PENGAWAL HABITUALISASI PANCASILA**



BUKU PILIHAN

personally  
**selected**  
books

ASISTEN ANDA

Dipilih oleh  
para pencinta  
buku



Toko online buku-buku pilihan,  
buku klasik, dan buku langka.

**TUHOR.COM**

jd tuhor.id

f tuhorcom

t tuhorcom

p tuhorcom

# TokohINDONESIA

The Journalistic Biography

## Pemimpin Umum

Ch. Robin Simanullang

## Pemimpin Redaksi

Ch. Robin Simanullang

## Redaktur Eksekutif

Mangatur L Paniroy

## Sekretaris Redaksi

Bantu Hotsan

## Redaktur

Dian Gina Rahayu, Marjuka Situmorang, Sahbuddin Hamzah, Imam Sumarsono, Ade Wiharyana

## Staf Redaksi

Dharma Leksana, Rukmana Rafli, Sastra Suganda, Boy Yapto

## Kontributor

Anis Fuadi, Ramlo Hutabarat, Samsuri, Al Amin

## Artistik

Esero Design

## Fotografer

Fiesta Image

## Pemimpin Usaha

Adur Nursinta Purba

## Iklan dan Promosi

Dian Gina Rahayu

## Sertifikat Merek

Ditjen HAKI Dephukham Agno: D00-02-2395

ISSN: 1908-9788

## Penerbit

PTASASIRA

## Rekening

BRI Cabang Jatinegara, Jakarta No.Rek 012201000902307

## Alamat

Jalan Buni No.36, Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450  
Tel: +6221 - 86907690  
Fax: +6221 - 86901951

## E-mail:

redaksi@tokohindonesia.com

## Website

www.tokohindonesia.com  
tokoh.id | tokoh.in | tokoh.co

## Harga:

Rp.32.500,-

## CATATAN REDAKSI

Politisi Kebangsaan ..... 5

## TOKOH.Id

### Zulkifli Hasan Sosok Politisi Kebangsaan



Dr. (HC). H. Zulkifli Hasan, SE, MM, pria kelahiran Penengahan, Lampung, 17 Mei 1962, seorang politisi yang memiliki prinsip perjuangan kebangsaan. Ketua MPR RI (2014-2019) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (2015-2020), yang juga pernah menjabat Menteri Kehutanan RI (2009-2014), tersebut menegaskan prinsipnya

bahwa politisi dan partai politik seharusnya menjalankan politik kebangsaan ..... 6

## NEWS REVIEW

### MPR Benteng Pancasila

Pengawal Habitualisasi Pancasila: Ketua MPR Dr (Hc). H. Zulkifli Hasan, SE, MM, memantapkan diri, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipimpinnya, menjadi pengawal utama internalisasi dan habitualisasi Pancasila sebagai falsafah bangsa, ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ..... 21

## PERSPEKTIF

Bersatu, Bersatu, Bersatu ..... 43

Kita Butuh Haluan Negara ..... 48

## FAMILY

### Harmonis, Panutan Keluarga

Zulkifli Hasan selalu berupaya membina keharmonisan dan kebersahajaan hidup dalam keluarganya. Suami dari Soraya, SPsi (menikah di Jakarta, 30 Maret 1987) ini adalah sosok suri teladan, panutan, pemimpin dan imam bagi keluarganya, terutama bagi keempat anaknya (Putri Zulya Savitri, Zita Anjani, M Farras Nugraha dan M Rafi Haikal), menantu dan cucu-cucunya. Di mata keluarganya dia suri teladan tanpa harus banyak bicara: Bersahaja! ..... 52

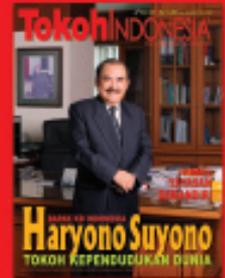
## OLAHRAGA

Olahraga Bela Diri ..... 57

## PEDULI

SMA Kebangsaan, Karpas Merah Buat Rakyat Miskin ..... 63

*Penulis: Ch. Robin Simanullang  
Peliput/Riset: Mangatur L. Paniroy, Bantu Hotsan, Rukmana Rafli, Boy Yapto  
Disain Sampul: Tian Son Lang  
Foto: Humas MPR-RI*

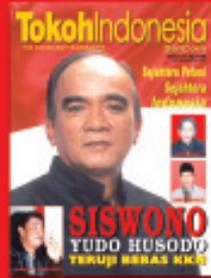


# TokohINDONESIA

Majalah Visi dan Biografi  
Pertama dan Satu-satunya  
di Indonesia



[www.tokohindonesia.com](http://www.tokohindonesia.com)  
THE EXPERIENCE SITE



# The Excellent Biography

## Politisi Kebangsaan



Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan prinsip dan sikapnya bahwa politisi (partai politik) seharusnya menjalankan politik kebangsaan bukan politik pragmatis. Melalui politik kebangsaan akan terwujud persatuan bangsa.

Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, persatuan menjadi modal penting untuk menjaga keutuhan NKRI. Dia menjelaskan, kita bisa memulai menanamkan persatuan dari hal-hal kecil. Seperti menghargai perbedaan dan menerima kemajemukan.

Mewujudkan persatuan, perlu toleransi dan mengesampingkan ego. Dia memberi contoh: Setelah perhelatan pemilu presiden selesai, saatnya semua pihak menerima hasilnya dengan lapang dada. Sportifitas harus tetap dijunjung.

Pernyataan ini, bukan sekadar ungkapan indah, melainkan secara sungguh-sungguh (nyata) dilakukan oleh Zulkifli Hasan, baik selaku Ketua MPR maupun Ketua Umum PAN. Sebagai Ketua MPR, sejak terpilih dan dilantik, Zulkifli langsung bergerak untuk memastikan berlangsungnya pelantikan presiden 20 Oktober 2014 sekaligus menjadikannya momentum rekonsiliasi politik nasional.

Sebagai Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan langsung membawa gerbong PAN mendukung dan

bergabung dengan kekuatan politik pendukung pemerintah. Dia menegaskan alasan utamanya adalah pengutamaan politik kebangsaan.

Dua hal tersebut di atas, adalah contoh nyata bagaimana semestinya seorang politisi bersikap dan menjalankan politik kebangsaan. Politik yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas

kepentingan pribadi, kelompok, partai dan golongan.

Maka, pada edisi ini kami mengapresiasi Zulkifli Hasan sebagai sosok politisi kebangsaan yang pantas dijadikan sebagai 'sekolah kehidupan' bagi setiap orang yang mau belajar dari pengalaman orang lain.

Pria kelahiran Penengahan, Lampung, 17 Mei 1962, itu bahkan bisa diposisikan sebagai ikon politisi yang memiliki prinsip perjuangan kebangsaan. Politisi yang juga pernah menjabat Menteri Kewilayatan RI tersebut dalam setiap mengemban amanah selalu mengedepankan kepentingan kebangsaan.

Jejak rekam Zulkifli sangat kuat untuk membuktikan bahwa seorang politisi justru lebih negarawan daripada seorang profesional yang bukan politisi. Seorang profesional yang kurang memahami politik kebangsaan justru akan berpotensi tersesat dalam keterbatasan lingkup profesionalismenya.



# ZULKIFLI HASAN

# Sosok Politisi Kebangsaan

**Dr.(HC). H. Zulkifli Hasan, SE., MM, pria kelahiran Penengahan, Lampung, 17 Mei 1962, seorang politisi yang memiliki prinsip perjuangan kebangsaan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2014-2019 dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) periode 1 Maret 2015 – 2020, yang juga pernah menjabat Menteri Kehutanan RI (22 Oktober 2009 - 1 Oktober 2014), tersebut menegaskan prinsipnya bahwa politisi dan partai politik seharusnya menjalankan politik kebangsaan bukan politik pragmatis semata.**

**M**enurut Zulkifli Hasan, melalui politik kebangsaan akan terwujud persatuan bangsa. “Persatuan menjadi modal penting untuk menjaga keutuhan NKRI. Kita bisa memulai menanamkan persatuan dari hal-hal kecil. Seperti menghargai perbedaan dan menerima kemajemukan. Dengan menanamkan semangat persatuan, kita akan menjadi bangsa yang kokoh dan tidak terpecah-belah. Persatuan menjadi salah satu jalan mencegah konflik di masyarakat. Toleransi dan persatuan merupakan suatu keharusan bagi pembangunan manusia dan sosial,” kata pengusaha yang menjadi politisi itu.

Zulkifli menegaskan untuk mewujudkan persatuan kita, harus menanggalkan individualisme dan mengesampingkan kepentingan pribadi. “Kepentingan bangsa yang lebih besar perlu diutamakan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” tegasnya.

“Persatuan tidak menuntut keseragaman karena seyogyanya ia dibangun di atas perbedaan,” jelas Zulkifli. Peraih penghargaan Bintang Jasa Mahaputra Adipradana dari Presiden Republik Indonesia itu

mengatakan toleransi, tenggang rasa, serta semangat gotong-royong yang telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata dunia adalah beberapa contoh upaya pemersatu tubuh bangsa. “Tanpa adanya semangat tersebut, bangsa Indonesia tidak akan mengenal arti persatuan karena terus berkuat dalam kubangan perbedaan,” tandasnya.

Dalam berbagai kesempatan Ketua MPR Ke-15 itu, mengingatkan pentingnya semangat kebangsaan dan persaudaraan. Sebab, setelah reformasi, menurutnya, ada yang hilang dari roh kebangsaan dan persaudaraan kita. “Kurang kepekaan persaudaraan kita. Semua bersaing, berkompetisi. Sesama anak bangsa berkelahi. Satu sama lain bawaannya marah saja. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah,” kata Zulkifli Hasan.<sup>1</sup>

Padahal, jelasnya, proklamator Soekarno sudah menegaskan bahwa rakyat Indonesia adalah keluarga besar NKRI. “Kita diwariskan Pancasila oleh pendiri bangsa. Pancasila itu memberikan kasih sayang,

<sup>1</sup> Ketua MPR Zulkifli Hasan, sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Forum Legislatif Mahasiswa Indonesia di Aula Politeknik Negeri Bali, Denpasar, Bali, Senin, 1 Februari 2016.



tempo.co

Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama pimpinan MPR lainnya menemui Presiden dan Wapres terpilih, Jokowi dan Jusuf Kalla, Senin 13 Oktober 2014 di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.

gotong-royong, musyawarah mufakat, keteladanan. Kalau ada temannya menderita, bantu. Kita harus sama-sama mempererat rasa persaudaraan,” tegasnya.

Penegasan Zulkifli Hasan tersebut bukan sekadar retorika atau basa-basi. Tetapi dia mengimplementasikan (habitualisasikan) dalam kehidupan keseharian, terutama dalam kegiatan politiknya. Saat kebanyakan politisi (partai politik) masih cenderung menjalankan politik pragmatis, mengutamakan kepentingan golongan dari pada kepentingan masyarakat yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara, sebagai Ketua MPR, dia tampil dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Di tengah tingginya suhu persaingan politik antara dua koalisi pendukung Capres-Cawapres 2014 yakni Koalisi Merah Putih (Prabowo-Hatta) dan Koalisi Indonesia Hebat (Jokowi-JK), Zulkifli Hasan terpilih

menjadi Ketua MPR (2014-2019) atas dukungan KMP. Namun sesaat setelah dia terpilih, Zulkifli dengan tenang dan berani menampakkan sosok (jati diri) sebagai pemimpin (politisi) berjiwa kebangsaan (negerawan).

Dia tidak tunduk pada 'konstituen' (anggota MPR yang memilihnya, termasuk para elit politik koalisi yang memilihnya, KMP) yang pada saat itu masih tampak belum ikhlas menerima kekalahan pada Pilpres. Zulkifli tampil dengan spirit perjuangan kebangsaannya. Dia menunjukkan sikap bahwa kasus terpecahnya golongan menjadi KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP (Koalisi Merah Putih) harus segera diakhiri.

Sebagai Ketua MPR, dia dengan tegas menyatakan sikap untuk mengayomi berbagai kelompok dan menyatukan mereka sebagai bagian dari politik kebangsaan. “Untuk itu sebagai ketua MPR, saya berperan untuk turut menjadi mediator islah

**Zulkifli menegaskan, perhelatan pemilu presiden sudah selesai, saatnya menerima hasilnya dengan lapang dada. Sportifitas harus tetap dijunjung. Dia tidak hanya berucap, melainkan dia bekerja keras untuk mewujudkannya. Zul bersama pimpinan MPR lainnya bertindak untuk merangkul berbagai pihak yang telah 'berperang' dalam pesta demokrasi pemilihan presiden.**

kedua kubu. Prinsipnya, (islah) KIH dan KMP adalah musyawarah mufakat, saling hormat menghormati, saling menghargai,” tegas Zulkifli kala itu. Dia tak mau terbawa arus 'politik balas dendam' yang masih membara di hati sebagian politisi dari koalisi yang memilihnya (KMP).

Dia pun menegaskan bahwa KIH harus ikut berada di seluruh AKD (alat kelengkapan dewan). “Seharusnya tidak ada lagi perpecahan golongan seperti itu. Sebagai wakil

rakyat, tugas kita adalah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat bukan kepentingan golongan. Mewujudkan persatuan memang tidak mudah, perlu toleransi dan mengesampingkan ego,” tegasnya.

Zulkifli menegaskan, perhelatan pemilu presiden sudah selesai, saatnya menerima hasilnya dengan lapang dada. Sportifitas harus tetap dijunjung. Dia tidak hanya berucap, melainkan dia bekerja keras untuk mewujudkannya. Zul bersama pimpinan MPR lainnya bertindak



Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama istri dan Presiden Jokowi dan istri serta Jusuf Kalla, seusul pelantikan Presiden/Wapres dalam Rapat Paripurna Sidang Umum MPR, Senin 20 Oktober 2014.



antarainpr.go.id

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Ketua MPP PAN Sutrisno Bachir dan Sekjen PAN Edhy Suparno menyatakan dukungan kepada pemerintah, dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, 2 September 2015. Presiden didampingi Ketua Umum Hanura Wiranto.

untuk merangkul berbagai pihak yang telah 'berperang' dalam pesta demokrasi pemilihan presiden. Suhu tensi politik pun mulai berangsur turun.

Kemudian, bersama pimpinan MPR lainnya, dia memastikan bahwa pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla harus berlangsung dengan tertib dan aman. Semua tokoh termasuk para pemimpin partai dari KMP diundang dalam pelantikan presiden tersebut dan dilakukan pendekatan intensif supaya berkenan hadir. Upaya politik kebangsaannya berbuah. Pelantikan Presiden 20 Oktober 2014 pun berlangsung dengan baik. Zulkifli berharap hal itu sekaligus menjadi momentum rekonsiliasi politik nasional.

Namun, ketegangan antara KMP dan KIH belum juga berakhir mes-

kipun telah menunjukkan kondisi positif dan kondusif saat Sidang Paripurna MPR pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut. Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR RI merasa terpanggil untuk aktif berperan langsung dalam mengkonsolidasi kedua kubu. Dia pun melakukan berbagai upaya untuk menyatukan anggota parlemen tanpa melihat koalisi yang melatarbelakangi mereka. Dia melakukan dialog dan lobi, dengan selalu menitikberatkan musyawarah mufakat dan semangat kebangsaan.

Tidak berhenti, selepas perhelatan nasional pelantikan presiden tersebut, beberapa bulan kemudian, tepatnya 1 Maret 2015, Zulkifli pun terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (2015-2020); Dia pun menyatakan dukungan PAN kepada pemerintahan

Jokowi-JK. Kemudian, Rabu siang 2 September 2015 di Istana Merdeka, Zulkifli Hasan mengumumkan PAN bergabung dengan pemerintahan Jokowi.

“Hari ini saya didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno dan Ketua MPP (Majelis Pertimbangan Partai) Soetrisno Bachir datang dengan satu maksud dan tujuan yang jelas: Kami (PAN) sepakat dan bulat menyatakan bergabung (dengan pemerintah). Kalau sebelumnya kami mendukung pemerintah, kini PAN bergabung untuk menyukseskan program pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Zulkifli Hasan membuka konferensi persnya di Istana.<sup>2</sup> Dalam konferensi pers itu, dia bersama Presiden

Jokowi dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

Zulkifli menjelaskan, keputusan PAN untuk bergabung dengan pemerintah Jokowi-JK itu diambil setelah para pengurus berdiskusi mengenai kondisi perekonomian nasional dan ekonomi global. Dia menegaskan, saatnya seluruh stakeholder negeri ini bersatu untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok, partai dan golongan.

Itulah Zulkifli Hasan yang punya prinsip perjuangan kebangsaan. Zulkifli Hasan menjabat Ketua MPR RI menggantikan Sidarto Danubroto, terhitung mulai 8 Oktober 2014 sd 2019. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Kehutanan (22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004-2009. Selain itu, pada 2005-2010,

<sup>2</sup> PAN Bergabung dengan Pemerintah Jokowi: <http://www.cnnindonesia.com/politik/20150902133959-32-76148/pan-bergabung-dengan-pemerintah-jokowi/>



Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri Napak Tilas ke Penjara Banceuy Bandung, Rabu, 1 Juni 2016, dalam rangka peringatan hari lahirnya Pancasila.

dia menjabat Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN).

### Jejak Langkah Zulkifli

Zulkifli Hasan, adalah putera dari pasangan petani Hasan dan Siti Zaenab. Dia lahir dan dibesarkan di pelosok Desa Pisang, Penengahan, Lampung Selatan, 17 Mei 1962. Sebagai anak petani, kehidupan masa kecilnya berada dalam himpitan kesulitan ekonomi. Maka sejak kecil, dia pun sudah dilibatkan bekerja keras membantu ekonomi keluarga dengan berjualan telur.

Setamat SD, 1975, saat berusia 13 tahun, dia dibawa ayahnya merantau ke Tanjungkarang. Di sana, Sang Ayah mendaftarkannya di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN). Zulkifli kecil menurut, walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Dia pun tinggal di rumah indeks. Tapi, saat tahun keempatnya di PGAN (1979), Zulkifli berhenti sekolah (tidak mau melanjutkan di PGAN),

tanpa sepengetahuan orang tuanya. Saat itu dia mengikuti ujian Madrasah Tsanawiah dan lulus. Namun ketika itu bertepatan pula memasuki tahun ajaran baru bagi sekolah umum. Dia pun mendaftar di SMAN Tanjungkarang dan diterima.

Dia pun belajar dengan baik. Tapi pada bulan keempat, ayahnya mengetahui perbuatannya. Zulkifli dipaksa keluar dari SMAN Tanjungkarang tersebut. Sang Ayah lebih menginginkannya supaya seperti Buya Hamka. "Saya itu dulu diarahkan orang tua menjadi seperti Buya Hamka. Tapi saya menolak. Saya ingin merantau ke Jakarta," kenang Zulkifli.<sup>3</sup>

Akhirnya, atas seijin, serta bekal doa dan sedikit uang dari ibunya, Zulkifli membulatkan tekad pergi me-

<sup>3</sup> Zulkifli Hasan Bicara Kesuksesannya sebagai "Sales" Panci dan Reformasi PAN, Kompas, Kamis, 22 Januari 2015; <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/22/21413111/Zulkifli.Hasan.Bicara.Kesuksesannya..sebagai.Sales.Panci.dan.Reformasi.PAN>



Ketua MPR Zulkifli Hasan pada acara Jalan Santai Spektakuler di Lampung, Minggu, 10 April 2016



mpn.go.id

Ketua MPR Zulkifli Hasan selesai memberikan kuliah umum serta menandatangani maket dan peletakan batu pertama pembangunan kampus baru Universitas Muhammadiyah Kendari, Kamis (18/2/2016).

rantau ke Jakarta tanpa memiliki dan mengandalkan kenalan atau pun sanak saudara. Di Jakarta, Zul melanjutkan hidupnya secara mandiri dengan segala dinamika dan romantika cita-dukanya. Di Ibu Kota, dia memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan berbagai pekerjaan, dari tukang cuci taksi hingga berjualan minuman.

### Sekolah Sambil Bisnis

Dia pun kemudian bisa melanjutkan sekolahnya di SMAN 53 Jakarta. Bahkan dia lulus SMA dengan predikat peraih nilai akhir terbaik di sekolahnya. Setelah lulus dari SMA (1982), Zul pun memulai bisnis kecil-kecilan menjadi pedagang peralatan rumah tangga (panci dan lain-lain) *door to door*, sambil mengajar les, menjual minuman, dan mencuci taksi. Usaha penjualan peralatan rumah tangganya terus ditekuni hingga Zul menjadi mahasiswa.

Kemudian, Zul melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi

Universitas Krisnadwipayana (Unkris), Jakarta. Dia membiayai kuliahnya secara mandiri dari hasil usahanya. Setelah lulus S1 (1996), Zul sempat mencoba bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Namun, dia hanya betah selama tujuh hari. Zul lebih tertarik memperoleh penghasilan di dunia bisnis sekaligus ingin mengembangkan minat dan bakatnya dalam dunia kepemimpinan, seperti yang diamanatkan ayahnya. Zul teringat perkataan ayahnya untuk jangan terus menjadi *follower* (pengikut) tetapi harus berani menjadi pemimpin meskipun dimulai dari sesuatu yang kecil.

“Ayah saya bilang kalau mau jadi orang itu jangan pernah jadi *follower* jadilah kepala meski kepala kecil. Saya teringat betul perkataan ayah,” kenang Zul.<sup>4</sup> Hal itulah yang

<sup>4</sup> PAN dorong Lampung kembangkan wirausahawan muda, AntaraNews.com, Minggu, 17 Juni 2012 17:53 WIB; <http://www.antaraneews.com/berita/316588/pan-dorong-lampung-kembangkan-wirausahawan-muda>



:: mpr.go.id

**KOMUNITAS KERONCONG:** Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bersama Wakil Ketua MPR Oesman Sapta dalam acara sosialisasi empat pilar MPR dengan komunitas keroncong di Senayan Jakarta, Kamis. 14 April 2016.

mendorong membulatkan tekad berhenti dari PNS. Meskipun dicibir teman-teman dan kerabatnya, dengan menyebutnya sudah 'miring' (stress) karena keluar dari PNS. Tapi karena dia sudah bertekad untuk menjadi pemimpin sekaligus mendapatkan penghasilan besar, dia mengacuhkannya. Dia tidak ingin terjebak menggunakan jabatan PNS untuk mengumpulkan uang (keayaan). Prinsipnya, kalau ingin mengumpulkan uang (kaya), jangan menjadi PNS.

Zul pun memutuskan berhenti sebagai PNS dan melanjutkan bisnisnya hingga berhasil membangun beberapa perusahaan. Di antaranya, dia mendirikan dan menjadi Presiden Direktur PT Batin Eka Perkasa, Jakarta (1988-2004), Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari, Jakarta (1997-2004), Presiden Direktur PT Sarana Bina

Insani, Jakarta (2000-2004), Komisaris PT Hudaya Safari Utama, Jakarta (2000-2006) dan Komisaris Utama PT Batin Eka Perkasa, Jakarta (2004-2005).

Sambil mengembangkan bisnisnya, Zul pun melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta, dan lulus pada 2003. Sebelum dan setelah meraih gelar S2 (Magister Manajemen), Zul selain sibuk mengembangkan bisnis, dia juga semakin intensif membagi waktu untuk berkontribusi dalam organisasi. Dia aktif sebagai Ketua Lembaga Buruh Tani dan Nelayan PWM DKI (2000-2005). Sebelumnya dia pernah menjadi Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Buruh Tani dan Nelayan Provinsi Lampung. Zul juga mengasah kepemimpinannya dengan aktivitasnya dalam Paguyuban Masyarakat Lampung Sai dan



mpri.go.id

**POLITIK KEBANGSAAN:** Dengan prinsip politik kebangsaannya, karier politik Zulkifli Hasan semakin meningkat hingga menjabat Ketua MPR-RI (2014-2019).

deklarator Ikatan Pemuda Lampung di Jakarta.

### Politik Kebangsaan

Kiprah politik Zulkifli Hasan diawali dengan menjabat Ketua Departemen Logistik DPP PAN (2000-2005). Dia pun terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009. Setelah menjabat anggota parlemen, dia pun melepas jabatan sebagai Presiden Direktur di beberapa perusahaannya. Di Senayan, dia menjadi Ketua Fraksi PAN (2004-2009), selain duduk di Komisi VI yang membidangi perhubungan dan infrastruktur. Dia pun didaulat (melalui voting) menjabat Ketua Pansus Hak Angket terkait kebijakan kenaikan harga BBM (2008).<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Pemilihan Ketua Pansus dilakukan dengan pemungutan suara di Ruang KK I, Gedung DPR, Rabu siang, 9 Juli 2008. Zulkifli Hasan meraih 28 suara dari 48 anggota pansus yang hadir. Empat kandidat lainnya adalah Bambang

Dengan prinsip politik kebangsaannya, karier politik Zulkifli Hasan semakin meningkat. Dia pun dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal DPP PAN 2005-2010, dalam kepemimpinan Soetrisno Bachir, sebagai Ketua Umum.

Kiprahnya di dunia politik, antara lain dalam upaya memperbaiki kepemimpinan dalam partai politik, diapresiasi Sekolah Tinggi Manajemen Pusat Pelatihan Manajemen (ST-PPM) dengan menganugerahkan “Kadarman Award” kepada Zulkifli Hasan pada 26 Juli 2007. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua ST PPM, Ir. Sulistio Ruslia, di Gedung Dhanapala Komplek Departemen Keuangan Jakarta Pusat.

Wuryanto (PDI-P, 18 suara), Efiardi Asda (PPP, 0 suara), Sutan Bhatogana (Demokrat, 0 suara), dan Ir. H. Azhar Romli (0 suara)

## Menteri Kehutanan

Dalam posisi sebagai Sekjen DPP PAN dengan prinsip politik kebangsaan yang diusungnya, dia terpilih kembali menjadi Anggota DPR dari Dapil Lampung I.pada Pemilu 2009. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkatnya menjabat Menteri Kehutanan, 2009-2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu II mewakili PAN. Dia menggantikan Malem Sambat Kaban. Jabatan Menteri Kehutanan itu diembannya dengan baik sejak 22 Oktober 2009 sampai 1 Oktober 2014.

Saat menjabat Menteri Kehutanan, Zul berhasil meningkatkan kinerja Kementerian Kehutanan melalui berbagai program. Di antaranya, pemudahan prosedur Kebun Bibit Rakyat (KBR), Hutan Edukasi yang melibatkan pelajar dan mahasiswa, moratorium izin pemanfaatan hutan, serta pengelolaan daerah aliran sungai.

Zul pun meraih berbagai penghargaan, di antaranya, sebagai Tokoh Perubahan Republika 2010; Gelar Doktor Honoris Causa di bidang Administrasi Publik dari Sejong University (Seoul, Korea); Doktor Kehormatan Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia,

Bhumandala Award karena berhasil mengimplementasikan informasi geospasial kehutananan; *Lifetime Achievement Award* dari La Trofi karena mengeluarkan kebijakan pro lingkungan dan pro rakyat; *Tiger Champion Award* dari Panthera karena usahanya dalam pelestarian harimau di Sumatera; Penghargaan Lencana Melati dari Presiden RI atas jasanya dalam pelestarian lingkungan hidup dan dianggap memiliki jasa dan pengabdian yang luar biasa bagi kepentingan Gerakan Pramuka; serta Bintang Jasa Mahaputra Adipradana dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

## Terpilih Ketua MPR

Setelah melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan mengundurkan diri, karena dalam Pemilu 2014 terpilih kembali menjadi Anggota DPR dari PAN periode DPR-RI 2014-2019, dilantik pada 8 Oktober



TERPILIH KETUA MPR: suasana sesaat Zulkifli Hasan terpilih menjadi Ketua MPR bersama pimpinan MPR lainnya, paket yang diajukan Koalisi Merah Putih



mpg.go.id

**TERPILIH KETUA MPR:** Zulkifli Hasan (PAN) terpilih menjadi Ketua MPR bersama Hadyat Nur Wahid (PKS), Mahyudin (Golkar), Oesman Sapta (PDP) dan EE Mangindaan (PD) sebagai wakil ketua secara demokratis, Rabu, 8 Oktober 2014.

2014. Tanpa diduga sebelumnya, penerima gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Negeri Semarang (2013) tersebut, terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR-RI) periode 2014-2019, dalam pemilihan yang berlangsung demokratis di tengah persaingan politik yang masih panas antara koalisi KMP dan KIH. Sebagai ketua MPR, dia pun dengan berani dan bijak menerapkan prinsip politik kebangsaannya.

Zulkifli Hasan terpilih dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berlangsung alot dan demokratis dipimpin pimpinan sementara MPR Maimanah Umar (tertua, DPD) didampingi Ade Rezki Pratama (termuda, Gerindra). Zulkifli dica-

lonkan Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), satu paket dengan empat calon Wakil Ketua MPR lainnya yakni Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hadyat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).

Melalui proses musyawarah yang panjang dan melelahkan, Sidang

**Zulkifli Hasan:**  
**Hidup itu adalah misteri. Tidak pernah mengejar jabatan, termasuk menjadi ketua MPR. "Saya tak pernah berencana untuk jadi ketua MPR namun karena tugas maka akan bekerja sebaik-baiknya."**

Paripurna MPR yang berlangsung dari pukul 10.30 Selasa 7 Oktober sampai subuh pukul 4.20 Rabu 8 Oktober 2014, berlangsung demokratis. Jauh berbeda dari proses pemilihan pimpinan DPR pada 1-2 Oktober 2014 yang didominasi tirani mayoritas, melebihi keburukan tirani Golkar pada masa Orde Baru.

Pada Sidang Paripurna pemilihan pimpinan MPR ini, politik jegal-menjegal tidak terlalu menonjol, kecuali oleh Partai Gerindra yang berusaha menjegal pencalonan Oesman Saptana dari kelompok DPD. Namun setelah melalui proses musyawarah yang amat panjang, akhirnya disepakati adanya dua paket pilihan. Yakni:

Paket A yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Hebat (pendukung pencapresan Jokowi-JK plus PPP): PDIP, PKB, Nasdem, PPP dan Hanura) terdiri dari Oesman Saptana (DPD) menjadi calon ketua, didampingi empat calon wakil ketua, Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem) dan Hasrul Azwar (PPP).

Paket B yang diajukan oleh Koalisi Merah Putih (pendukung pencapresan Prabowo-Hatta minus PPP) terdiri dari Zulkifli Hasan (PAN) sebagai calon ketua, didampingi empat calon wakil ketua, Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Saptana (DPD).

Penetapan dua paket ini ditetapkan setelah dalam forum loby (musyawarah) tidak tercapai kata sepakat untuk mengusung satu paket sebagaimana diusulkan Koalisi Indonesia Hebat yakni calon ketua dari DPD dan empat calon wakil ketua, masing-masing dua dari

Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

Setelah itu, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara tertutup, di mana setiap anggota menggunakan hak pilihnya secara bebas. Voting berlangsung lebih empat jam, hingga berakhir pukul 4.20 WIB. Hasilnya, Paket B memperoleh 347 suara. Sementara itu, Paket A memperoleh 330 suara. Satu suara abstain.

Proses pemungutan suara itu berlangsung hingga lebih kurang empat jam. Jumlah anggota yang hadir sebanyak 678 orang. Terdiri dari Koalisi Merah Putih: 87 anggota Fraksi Golkar, 73 anggota Fraksi Gerindra, 48 anggota Fraksi PAN, 40 anggota Fraksi PKS, dan 58 anggota Fraksi Demokrat; Koalisi Indonesia Hebat: 106 anggota Fraksi PDIP, 47 Anggota Fraksi PKB, 36 anggota Fraksi Nasdem, 16 anggota Fraksi Hanura, 38 anggota Fraksi PPP, dan 129 anggota DPD.

Setelah voting selesai, sidang paripurna diskors. Setelah itu sidang kembali dibuka dengan mata acara pengambilan sumpah/janji pimpinan MPR terpilih periode 2014-2019, yang terdiri dari: Ketua: Zulkifli Hasan; Wakil Ketua: Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Saptana.

Sebelum pelaksanaan voting kedua calon ketua terlebih dahulu dipersilakan menyampaikan visi-misi dalam waktu lima menit. Pada kesempatan itu, Calon Ketua MPR dari Koalisi Merah Putih (KMP) Zulkifli Hasan berjanji bila terpilih menjadi Ketua MPR akan menjadikan lembaga itu menjadi amat penting untuk menjaga Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Dia juga berjanji akan membina hubungan



**TERPILIH KETUA UMUM PAN:** Zulkifli Hasan terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Kongres PAN di Bali, 1 Maret 2015, diapit Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir dan mantan Ketua Umum dan MPP PAN Amien Rais.

kerja antara MPR, DPR dan DPD secara seksama.

Zulkifli mengatakan, MPR sebagai lembaga tinggi negara, memiliki kewenangan untuk mengawal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila terpilih sebagai ketua MPR, Zulkifli berjanji untuk memperkuat harmonisasi antara DPR dan DPD. "Mungkin sekarang suara DPD kurang, maka tugas ketua MPR lah untuk memperkuat itu," janji Zulkifli.

Pada awal penyampaian visinya, Zulkifli mengungkapkan bahwa baginya hidup itu adalah misteri. Zulkifli menyatakan, tidak pernah mengejar jabatan menjadi ketua MPR. Namun karena garis tangannya menuntun dia sampai ke calon ketua MPR. "Saya tak pernah berencana untuk jadi ketua MPR namun karena tugas maka akan bekerja sebaik-baiknya," ujar Zulkifli Hasan.

## Ketua Umum PAN

Kemudian, kiprah politik kebangsaannya semakin membawanya ke cakrawala politik yang lebih intens dan luas. Dalam Kongres PAN yang diadakan di Bali, 1 Maret 2015, Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua Umum PAN periode 2015 - 2020. Dia terpilih melalui pemungutan suara dengan memperoleh 292 suara, mengalahkan petahana Hatta Rajasa yang memperoleh 286 suara.

Sebagai Ketua Umum PAN dia bertekad untuk memperbaiki citra partai politik supaya jangan sampai kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Hal itu ditegaskannya, karena dalam berbagai survei menunjukkan partai politik sebagai lembaga yang korup dan tak memperjuangkan kepentingan rakyat. "Citra partai politik di titik nadir. Karena selama ini dipandang hanya mementingkan diri sendiri," kata

Zulkifli Hasan.<sup>6</sup>

Maka, menurutnya, elit partai harus menunjukkan bahwa anggapan itu tidak benar. Untuk itu partai politik harus mempunyai tujuan seperti cita-cita bangsa Indonesia yang diamanatkan *founding fathers*. Menurutny, partai politik mempunyai peranan utama dalam demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa partai politik. Bila partai politik memiliki integritas maka demokrasi di negeri ini akan menjadi lebih baik.

Sejak berkiprah dalam kegiatan organisasi politik (Partai Amanat Nasional, hingga menjabat Ketua Umum), Bang Zul giat menjadi motivator di berbagai kesempatan bagi para pemuda dan masyarakat luas, untuk membuka wirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Terutama sebagai Ketua Umum PAN, dia memberi perhatian khusus serta memberi banyak bantuan dalam program kerja bersama dengan masyarakat, yakni



Ketua MPR Zulkifli Hasan

program PAN, yang dikenal dengan sebutan MAPAN (maju bersama PAN).

### Capres-Cawapres 2019

Melihat jejak rekam Zulkifli Hasan, Redaksi TokohIndonesia.com, memandang tokoh nasional dan tokoh kebangsaan yang berasal dari Lampung ini pantas didaulat menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2019 nanti.

Kendati dia sendiri tak punya obsesi untuk itu. Dia memang tak pernah mengumbar obsesi untuk merebut jabatan publik. Baginya, menjadi pejabat negara adalah amanah. Mengalir saja. Sebagaimana belumlah juga tidak pernah berambisi jadi menteri dan Ketua MPR.

Saat Presiden SBY menunjuknya jadi Menteri Kehutanan, dia mengaku sempat kaget. Bukan hanya karena jabatan Menteri Kehutanan merupakan bidang yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, juga lantaran tak terpikir olehnya akan menjabat menteri. Isterinya juga mengaku sempat kaget. Tapi lantaran tugas pejabat tinggi negara itu adalah amanah, dia bersyukur, dan menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ada masalah berarti.

■ mti -ch. robin simanullang

**Melihat jejak rekam Zulkifli Hasan, Redaksi TokohIndonesia.com, memandang tokoh nasional dan tokoh kebangsaan yang berasal dari Lampung ini pantas didaulat menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2019 nanti. Kendati dia sendiri tak punya obsesi untuk itu. Dia memang tak pernah mengumbar obsesi untuk merebut jabatan publik.**

<sup>6</sup> Zulkifli Hasan saat bertatap muka dengan masyarakat di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 31 Juli 2016



# MPR

## BENTENG PANCASILA



mpri.go.id

## PENGAWAL HABITUALISASI PANCASILA

**Ketua MPR Dr (Hc). H. Zulkifli Hasan, SE, MM, memantapkan diri, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipimpinnya, menjadi pengawal utama internalisasi<sup>1</sup> dan habituaisasi<sup>2</sup> Pancasila sebagai falsafah bangsa, ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

<sup>1</sup> **Internalisasi**/in-ter-na-li-sa-si/ n 1 penghayatan: proses — falsafah negara secara mendalam berlangsung lewat penyuluhan, penataran, dan sebagainya; 2 Pol penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. (KBBI).

<sup>2</sup> **Habituaisasi**, berasal dari kata habitat/ha-bi-tat/ n 1 tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat; 2 Bio tempat hidup organisme tertentu; tempat hidup yang alami (bagi tumbuhan dan hewan); lingkungan kehidupan asli; 3 Geo tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan

**B**ersama pimpinan MPR (2014-2019) lainnya (Wakil Ketua: Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta), Zulkifli Hasan sangat intens menginternalisasi dan menghabitualisasi Pancasila yang dikemas dalam program/modul sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (MPR) yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal.<sup>3</sup>

Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tak sudi membiarkan Pancasila terancam lumpuh karena selama ini hanya dihafalkan tanpa dijadikan pedoman perilaku hidup sehari-hari. Maka dia pun mengintensifkan peran MPR untuk menjadikan Pancasila sebagai budaya dan perilaku hidup sehari-hari.

Dia pun mengajak seluruh komponen bangsa menggalakkan sosialisasi modul Empat Pilar Kebangsaan,

---

bumi (KBBI); Hibitualisasi, pembiasaan yaitu proses menjadikan sesuatu norma menjadi bagian dari seluruh mekanisme kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ketika suatu norma/tindakan (Pancasila) telah menjadi sesuatu yang habitual maka ia telah menjadi tindakan yang mekanis. Pada tahap internalisasi setiap norma diterima, dipahami, dan dihayati secara mendalam dalam diri individu. Lalu pada tahap habituasasi norma yang sudah diterima tersebut dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung diulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan.

<sup>3</sup> **Empat Pilar Kebangsaan MPR**, istilah yang digunakan MPR untuk merujuk Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika, sempat menjadi polemik. Sejumlah warga negara mengajukan gugatan pengujian Pasal 34 ayat (3) huruf b UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan. Dalam putusannya, MK menghapus frasa "empat pilar kebangsaan dan bernegara" dalam pasal itu. "Frasa' empat pilar kebangsaan dan bernegara' dalam Pasal 34 ayat (3b) UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Majelis MK saat membacakan putusan bernomor 100/PUU-XI/2013 di ruang pleno MK, Kamis (3/4/2014). Namun, atas kesepakatan MPR dan MK, Senin (2/3/2015), istilah 'empat pilar' tetap dapat digunakan untuk program sosialisasi yang dilakukan MPR.

bukan hanya MPR, agar Pancasila benar-benar mewarnai perilaku hidup rakyat Indonesia sehari-hari.<sup>4</sup> Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, tetapi bersifat universal.

Tentang nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan<sup>5</sup> menceritakan bagaimana Presiden Soekarno menguraikan Pancasila ketika berpidato di hadapan Kongres Amerika Serikat, tahun 1956. Selepas berpidato, para anggota kongres bertepuk tangan bahkan ada yang sampai berdiri sebagai rasa kagum pada apa yang diuraikan dalam pidato itu. Mereka menyambut baik pidato Presiden Soekarno karena Pancasila mengandung nilai-nilai universal.

Setelah itu, Presiden Soekarno menjelaskan kembali nilai-nilai universal Pancasila di hadapan para anggota PBB tahun 1960. Sebagaimana dipaparkannya pada beberapa kesempatan<sup>6</sup>, Zulkifli Hasan mengutip pidato Bung Karno saat di Sidang Umum PBB pada tahun 1960, dimana Presiden Soeharto menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak ikut ideologi Barat yang beraliran liberalis-kapitalis dan ideologi Timur yang beraliran komunis. "Kita mempunyai ideologi sendiri, yakni ideologi Pancasila," ujar Zulkifli mengutip Bung Karno.

<sup>4</sup> **Zulkifli Hasan** usai menyampaikan materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Bale Racage, Cianjur, Jawa Barat, Minggu 19 Juni 2016, yang diikuti sekitar 200 peserta. Sosialisasi merupakan kerjasama MPR dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cianjur.

<sup>5</sup> Ketua MPR Zulkifli Hasan di hadapan para wisudawan Universitas Nasional, di Jakarta Convention Center, Jakarta, 13 September 2015.

<sup>6</sup> Ketua MPR Zulkifli Hasan saat melakukan sosialisasi empat pilar kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terhimpun dalam Paguyuban Flobamora di Hotel Neo Kupang,, Minggu 31 Juli 2016.

Saat itu Soekarno menyangkal bahwa dunia hanya terbagi dalam dua blok, komunis dan kapitalis. Menurut Soekarno masih ada jutaan rakyat lain yang tak menganut kedua blok itu (yang kemudian dikenal dengan sebutan Nonblok). Rakyat (nonblok) itu bisa berada di Amerika Latin, Afrika dan Asia. Secara khusus Presiden Soekarno menegaskan bahwa Indonesia tak dipimpin oleh kedua paham itu (kapitalis dan komunis). Indonesia mempunyai paham sendiri yakni Pancasila. Pancasila yang nilai-nilainya telah terkandung di nusantara sejak berabad-abad yang lalu. Indonesia, jelas Zulkifli, punya sistem sendiri yang disebut Pancasila, yang digali dari sejarah dan kearifan lokal negeri ini. Pancasila sangat relevan dengan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau,

berlatar belakang multietnik, ratusan suku dan bahasa, serta berbagai agama. “Berbeda dengan di Barat, menyusun konstitusi falsafah negerinya melalui satu ras dan agama. Indonesia tidak bisa seperti itu,” kata Zulkifli.<sup>7</sup>

Dalam kaitan itu, kata Zulkifli, Indonesia merupakan bangsa yang toleran. Bagaimana tidak, dengan penduduk mayoritas orang Jawa, tapi yang menjadi bahasa nasional adalah bahasa Melayu. “Kita terdiri dari 400 suku bangsa, 600 etnis, berbagai budaya dan agama punya mimpi yang sama. Berbeda dengan barat agamanya sama identitasnya sama. Kita beragam mayoritas makanya banyak orang Jawa yang

<sup>7</sup> Zulkifli Hasan saat memberikan ceramah Empat Pilar MPR RI, di Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Jumat (11/3/2016).



mp.r.go.id

**ETIKA BERBANGSA:** Ketua MPR Zulkifli Hasan menjadi narasumber dalam Seminar Penguatan Etika Berbangsa dan Bernegara yang diselenggarakan oleh KY di FHUI Depok, 25 Februari 2016



mpg.go.id

**SEMINAR NASIONAL KEBANGSAAN:** Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama pimpinan MPR lainnya dan Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri pada saat Seminar Nasional Kebangsaan di Jakarta, 18 Agustus 2015.

bisa bahasa Melayu,” ujar Zulkifli Hasan di Pekanbaru.<sup>8</sup>

“Cita cita Indonesia merdeka yang diperjuangkan para pendiri negeri ini tanpa bersatu tidak mungkin kita berdaulat, tanpa berdaulat tidak mungkin bisa berlaku adil, tidak berlaku adil tidak akan dicapai kemakmuran bersama. Cita cita Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur,” lanjut Zulkifli Hasan menjelaskan.

Dia mengingatkan, pemimpin harus bisa merangkul seluruh masyarakat sehingga mampu mengaplikasikan empat pilar kebangsaan di semua lapisan. Dia menegaskan, segenap elemen bangsa Indonesia tidak boleh melupakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara,

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia, harus tetap kokoh dan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Zulkifli menjelaskan, Pancasila satu rangkaian sebagai filosofi bangsa. Pancasila mempunyai makna cinta kasih, kasih sayang, kekeluargaan, gotong-royong dan musyawarah mufakat. “Inti dari Pancasila adalah kasih sayang dan gotong-royong. Kita hidup berbangsa dalam satu keluarga yang bergotong-royong dan musyawarah mufakat,” jelasnya.

Zulkifli Hasan menjelaskan, sesungguhnya Pancasila sudah menjadi pandangan hidup bangsa Indone-

<sup>8</sup> Zulkifli Hasan di Pekanbaru dalam seminar sosialisasi empat pilar MPR yang dihadiri mahasiswa Universitas Riau dan peserta olimpiade PPKN se Riau, Selasa, 8 Maret 2016.

sia sejak dulu kala. Maka, tegasnya, nilai-nilai luhur yang penuh kekeluargaan tersebut harus menjadi perilaku sehari-hari (habitat) agar mendapat sinar cahaya ketuhanan. Menurutnya, bila kita berperilaku sesuai dengan Pancasila maka kita akan memanusiakan manusia secara adil dan beradab. Dalam bertutur kata, akan penuh etika dan tatakrma dan penuh kesejukan dan tidak akan menyebar kebencian. Sayangnya, Zulkifli Hasan mengakui, masyarakat sudah banyak yang meninggalkan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila kehilangan ruhnya kalau orang sudah saling hujat, tidak mau tolong-menolong, dan main menang-menangan sendiri. Begitu juga saling klaim kuasa lembaga negara. Politisi PAN itu mencontohkan DPD tidak ada fungsinya, begitu juga MPR, hanya bisa memberikan rekomendasi, sementara DPR merasa paling hebat. Namun DPD mengklaim lebih berkuasa karena yang punya daerah. MPR pun demikian, karena bisa merubah konstitusi, menilai lembaga yang paling tinggi, dan begitu seterusnya antar lembaga negara.

# BERHENTI SALING MERENDAHKAN MULAILAH MENGHORMATI PERBEDAAN

\*IMPLEMENTASI SILA KE-1 PANCASILA

**INI BARU**  
**INDONESIA**  
DARI MPR RI UNTUK NKRI



mpri.go.id

**SOSIALISASI 4 PILAR:** Ketua MPR Zulkifli Hasan pada acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dengan DPP IMM di Manado, 29 Oktober 2015

Begitu pula dalam kehidupan keseharian masyarakat. Budaya Pancasila, menurut Zulkifli sudah tergerus. Dia menggambarkan, dahulu jika seorang anak berbicara keras sama orang tua bisa beringgu-minggu dimarahi. Sekarang, ada anak menuntut ibunya di pengadilan. Sebaliknya, ada orang tua yang bunuh dua anaknya tapi masih bisa tertawa.

Barangkali hal tersebut sebagai salah satu dampak negatif globalisasi. Dipaparkan kecenderungan global menciptakan teknologi baru dalam bidang komunikasi yang membuat dunia tanpa jarak dan membuat peristiwa lokal dipengaruhi globalisasi. Globalisasi menerpa seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

Globalisasi yang melanda Indonesia, papar Zulkifli, membuat munculnya gerakan demokratisasi di satu sisi, dan mengakibatkan munculnya desentralisasi hingga etno lokal di sisi lain.

Selain itu, desentralisasi juga mengakibatkan adanya pasar bebas. Pasar bebas yang demikian massifnya mengakibatkan lemahnya perlindungan kepada rakyat, munculnya pelaku ekonomi yang tak terkendali, dan menjadikan pemerintah lemah dalam mengambil kebijakan karena tekanan dan pengaruh dari luar.

Ketua MPR menegaskan, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila dapat menangkal dampak negatif globalisasi itu. Tetapi melihat kenyataan belakangan ini, dia khawatir dan berharap kiranya dampak negatif globalisasi itu jangan sampai meminggirkan Pancasila yang merupakan nilai-nilai universal yang telah digali oleh para pendiri bangsa ini.

Maka, Zulkifli menekankan agar kita membumikan Pancasila untuk menangkal segala hal negatif dari massifnya dampak globalisasi dengan semangat kerja sama dan solidaritas. Zulkifli Hasan menekankan supaya kita (harus) mereflesi-

kan Pancasila, apakah masih diterima atau tidak.

Dalam kaitan ini, Ketua MPR memaparkan urgensi sosialisasi empat pilar kebangsaan yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab MPR sesuai dengan amanat UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU itu, MPR diberi amanat untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR.

Secara khusus tentang pemasyarakatan Ketetapan MPR, khususnya

TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, kata Zulkifli Hasan,<sup>9</sup> adalah wujud peran MPR dalam menciptakan suasana sejuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada etika dan moral bangsa baik dalam bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Menurutnya, dengan melaksanakan etika kehidupan berbangsa maka Indonesia akan mampu meng-

<sup>9</sup> Zulkifli Hasan pada peringatan hari lahir Pancasila di Blitar, Senin (1/6/2015).

**BERHENTI  
MEMAKI  
MULAILAH  
MEMAKAI HATI**

\*IMPLEMENTASI SILA KE-2 PANCASILA

**INDONESIA**  
DARI MPR RI UNTUK NKRI



mpri.go.id

**SOSIALISASI 4 PILAR:** Ketua MPR Zulkifli Hasan pada acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dengan Marga Adat Ketipung di Gedung PKK Bandar Lampung, Kamis, 22 Oktober 2015.

hadapi tantangan bangsa dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis, sistem hukum yang adil, sistem ekonomi yang adil dan produktif, sistem sosial budaya yang beradab, penciptaan sumber daya manusia yang bermutu serta akan mampu menangkal dampak negatif globalisasi.

Zulkifli menegaskan, adalah menjadi tanggung jawab besar semua elemen bangsa untuk melaksanakan sila demi sila Pancasila sebagai perwujudan janji-janji kebangsaan yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa. “Pemenuhan janji-janji kebangsaan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai dimensi strategis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” jelas Ketua MPR.

Dia menegaskan, kehidupan politik Indonesia haruslah politik Pancasila, kehidupan ekonominya ekonomi Pancasila, kehidupan sosial budaya juga berdasar Pancasila. Demikian pula dalam penegakan hukum, dan

menjalankan pemerintahan, haruslah bersendikan nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila yang menjadi dasar dan falsafah bangsa itu, digali dari bumi Indonesia, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berlaku secara universal,” jelas Zulkifli Hasan dalam rilis Humas MPR RI yang diterima TokohIndonesia.com di Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Menurut dia, kebenaran dan nilai universalitas Pancasila bisa dibuktikan, namun sayangnya bangsa Indonesia sendiri malah mulai melupakan atau meminggirkan Pancasila dan lebih menuruti globalisasi.

Dia menguraikan, globalisasi menyerpa Indonesia berbarengan dengan masuknya demokratisasi pada awal reformasi yang mengarah demokrasi liberal yang kebablasan. Sejak itu tuntutan otonomi semakin menjadi-jadi. “Hak asasi ditegakkan, di atas reruntuhan kepentingan sosial. Pada saat yang sama perusahaan-perusahaan asing makin tajam

mencengkeramkan kuku-kukunya untuk melahirkan sistem ekonomi liberal,” katanya.

Maka dia menegaskan hal itu tidak boleh dibiarkan serta sudah saatnya bangsa Indonesia kembali kepada Pancasila.

### Pemersatu Bangsa

Sebagai bangsa yang beragam, Zulkifli Hasan juga mengakui di masyarakat ada perbedaan. Namun di tengah perbedaan itu, Indonesia bisa bersatu, karena ideologi Pancasila yang juga merupakan falsafah

pemersatu bangsa. Dengan Pancasila, jelas Zulkifli Hasan, bila ada perbedaan harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. “Boleh sepakat atau tidak dalam mengambil keputusan asal musyawarah,” ujarnya.

Zulkifli menekankan pentingnya bagi seluruh warga negara untuk saling menghargai. Dia menegaskan perbedaan yang ada dalam kehidupan ini harus dicari solusinya melalui musyawarah mufakat. “Tentu ada perbedaan dalam berbangsa dan bernegara, sekecil apapun itu. Da-

**BERHENTI  
BERSETERU  
MULAILAH  
BERSATU**

\*IMPLEMENTASI SILA KE-3 PANCASILA

**INDONESIA**  
DARI MPR RI UNTUK NKRI

**INI BARU**



FGD: Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka Focus Group Discussion (FGD) di Bengkulu, Selasa, 19 April 2016.

lam mengatasi masalah-masalah itu, digariskan dalam Pancasila, harus musyawarah mufakat,” ujar Zulkifli Hasan.<sup>10</sup>

“Tidak boleh memaksakan kehendak, main hakim sendiri. Vihara dibakar, itu kejahatan, tidak dibenarkan main hakim sendiri. Kalau ada perbedaan, musyawarah mufakat. Perbedaan itu adalah identitas Indonesia kita, jangan sampai hilang. Harus respek satu dengan yang lain. Kalau kita respek satu sama lain kita akan jadi bangsa yang besar,” tutur Zulkifli.

Dalam kaitan itu, Ketua MPR sangat menyesalkan terjadinya kerusuhan dan pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai, Sumatera Utara (Sumut) Jumat (29/7/2016) menjelang tengah malam, sekitar pukul 23.00. “Saya menyesalkan

terjadinya kerusuhan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Hal seperti ini tak boleh terjadi lagi,” ujar Zulkifli Hasan, Sabtu (30/7/2016).

Ketua MPR meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menahan diri. “Mari kita hidup berdampingan secara damai. Merajut kebhinekaan merupakan tugas kita bersama. Kita akan menjadi bangsa yang kuat kalau kita menghargai keragaman,” kata Zulkifli Hasan.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia selama ini dikenal dengan toleransi dalam keberagamannya. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang saling menghormati dalam perbedaan. Apapun latar belakang suku maupun agamanya, kita adalah satu Bangsa Indonesia,” tegas Zulkifli Hasan.

Zulkifli mengatakan dengan semangat kebangsaan dan kebersamaan itulah maka terjadi konsensus empat pilar MPR. Visi Indonesia

<sup>10</sup> Zulkifli Hasan menyampaikan hal itu dalam sosialisasi empat pilar yang diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan Lembaga Bhakti Flobamora di Hotel Neo, Kupang, Minggu (31/8/2016).

merdeka adalah tidak mungkin negara bisa bersatu kalau tidak merdeka. Juga tidak mungkin negara bisa berdaulat kalau tidak bersatu, serta rakyat tidak akan makmur kalau Indonesia tidak berdaulat.

Zulkifli menegaskan, dalam ketatanegaraan, MPR tidak hanya menjalankan fungsi sesuai UUD dan UU, tetapi lebih dari itu, MPR menjadi 'penjaga gawang' dan benteng utama dalam menangkal pengaruh negatif globalisasi khususnya terhadap ideologi Pancasila.

Selain itu, Zulkifli Hasan, menga-

takan Majelis Permusyawaratan Rakyat kini dianalogikan sebagai penjaga gawang dalam menampung aspirasi rakyat sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. "Jadi sistem kita musyawarah mufakat dan perwakilan, makanya dinamakan majelis yang artinya perwakilan seluruh rakyat, perwakilan setiap golongan, perwakilan daerah," ujarnya.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Zulkifli Hasan di Pekanbaru, Op.Cit.

# BERHENTI BESAR KEPALA MULAILAH BERLAPANG DADA

\*IMPLEMENTASI SILA KE-4 PANCASILA

**INI BARU**  
**INDONESIA**  
DARI MPR RI UNTUK NKRI



LDII: Ketua MPR Zulkifli Hasan disambut saat berkunjung ke Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kediri, Kamis, 10 Maret 2016

## Survey Implementasi

Ketua MPR Zulkifli Hasan berulang kali mengungkapkan bahwa Pancasila terancam lumpuh karena hanya dihafalkan tanpa dijadikan pedoman perilaku hidup sehari-hari. Menurutnya, hal itu merupakan suatu tantangan bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai budaya dan perilaku hidup sehari-hari.

Ketika berbicara dalam acara sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Bale Racage, Cianjur, Jawa Barat, Minggu (19/6/2016, yang diikuti sekitar 200 peserta dan merupakan kerjasama MPR dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cianjur, Zulkifli Hasan mengajukan empat pertanyaan kepada peserta untuk mencocokkan hasil survei sebuah media.

*Pertama:* “Apakah persatuan Indonesia saat ini semakin kuat atau semakin lemah?”

“Siapa yang berpendapat makin

kuat?” tanya Zulkifli Hasan, lalu meminta tunjuk tangan. Tapi tidak ada peserta yang merespon. Kemudian dia pun melanjutkan pertanyaan: “Siapa yang berpendapat persatuan semakin lemah?” Hampir semua peserta angkat tangan. Hasil itu cocok dengan hasil survei, dimana hanya 7 persen responden yang menjawab persatuan semakin kuat dan 93 persen menjawab persatuan semakin lemah.

*Kedua:* “Apakah semakin kuat atau semakin lemah, perilaku musyawarah untuk mencapai mufakat?” Pertanyaan ini direspon sebagian besar menjawab semakin lemah. Cocok dengan hasil survei, yaitu hanya 1,6 persen responden yang menjawab musyawarah untuk mufakat semakin kuat dan 98,4 persen yang mengatakan Indonesia tidak menganut musyawarah lagi.

*Ketiga:* “Apakah semakin kuat atau semakin lemah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di

atas kepentingan pribadi?” Mayoritas peserta menjawab semakin lemah. Sesuai dengan hasil survey, yaitu 5 persen menjawab semakin kuat dan 95 persen semakin lemah. Artinya, saat ini orang memiliki ego yang tinggi karena menempatkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara.

*Keempat*; “Apakah perilaku kita semakin jauh atau semakin dekat dari sila kelima Pancasila?” Mayoritas menjawab semakin jauh. Cocok dengan hasil survei yakni hanya 7

persen yang menjawab semakin dekat dan 93 persen menjawab semakin jauh.

Dari data-data itu, Zulkifli menyimpulkan bahwa Pancasila terancam lumpuh. Pancasila dihafal tapi tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan saat ini Pancasila seperti-nya sudah tidak dihiraukan lagi. Pemahaman nilai-nilai luhur bangsa menjadi tidak menarik untuk dipelajari dan diamalkan.

# STOP DISKRIMINASI MULAILAH TOLERANSI

\*IMPLEMENTASI SILA KE-5 PANCASILA

**INDONESIA**  
DARI MPR RI UNTUK NKRI

INI BARU

Menurutnya, kondisi seperti ini pula yang membuat terjadinya kasus seorang artis yang mengolok-olok Pancasila sebagai simbol negara yang sangat dihormati seluruh bangsa Indonesia.<sup>12</sup> Dia memandang kejadian tersebut sebagai peringatan atau lampu merah bagi bangsa ini agar semua kembali memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa.

Padahal, jelas Zulkifli Hasan, Pancasila adalah perilaku yang disinari cahaya Ketuhanan. “Setiap individu haruslah menjadi manusia yang disinari cahaya Illahi atau ketuhanan. Bila disinari cahaya Illahi atau ketuhanan, maka perilakunya memanusiaakan manusia, berperike-manusiaan dan beradab, tidak memecah belah, tidak menghasut, dan tidak menebarkan kebencian.”

Berulang kali Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Pancasila adalah cinta kasih, kasih sayang, gotong-royong, dan musyawarah mufakat. “Tapi, apakah cinta kasih dan kasih sayang itu masih melekat di keluarga kita sekarang ini, itulah yang menjadi masalah,” kata Zulkifli Hasan. Maka Ketua MPR itu mengharapkan, siapa pun yang mengaku warga negara Indonesia, setiap prilaku dan tindak tanduknya harus disinari oleh cahaya Pancasila.<sup>13</sup>

Bagaimana caranya agar setiap prilaku dan tindak tanduk kita

<sup>12</sup> Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di gedung Pemda Provinsi, Bengkulu, Selasa, 19 April 2016 yang diikuti sekitar 300 peserta dari kalangan birokrat Pemprov Bengkulu dan perwakilan mahasiswa.

<sup>13</sup> Ketua MPR RI DR (HC) Zulkifli Hasan, Kamis 12 Mei 2016, di Kampus C Universitas Airlangga di Margomulyo, Surabaya, saat membuka secara resmi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, diikuti oleh 600 peserta, terdiri dari dosen, mahasiswa, kader parpol, LSM, dan tokoh masyarakat.



PERS: Ketua MPR Zulkifli Hasan melayani wawancara awak pers

disinari oleh Pancasila? Zulkifli Hasan mengatakan adalah dengan cara musyawarah mufakat. “Karena musyawarah mufakat itu asli Indonesia dan akan mendatangkan kesejahteraan,” jelasnya. Dia memberi contoh pembangunan sebuah jembatan di Bojonegoro<sup>14</sup> tanpa masalah karena dilandasi musyawarah mufakat. “Dengan musyawarah mufakat, ada penduduk yang memiliki tanah di daerah itu secara sukarela menyerahkan tanahnya, tanpa minta ganti rugi,” ungkap Zulkifli. Menurut Zulkifli, hal ini bisa menjadi model rakyat dan bupati yang Pancasila-lais.

<sup>14</sup> Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bersama Bupati Bojonegoro Suyoto meresmikan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Padangan-Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Rabu, 11 Mei 2016. Jembatan sepanjang 200 meter dengan lebar 7 meter itu memperpendek jarak sepanjang 10 Km dari yang biasa digunakan masyarakat untuk memutar ke arah Cepu, Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, ketua MPR turut menyaksikan penyerahan penghargaan yang dilakukan Pemkab Bojonegoro kepada ahli waris M. Mansyur, warga masyarakat yang merelakan tanahnya sebagai lokasi pembangunan jembatan. Saat menyampaikan dialog kebangsaan, Zulkifli Hasan antara lain menyebut Bupati Bojonegoro Suyoto bisa menjadi model Bupati yang Pancasila-lais, karena dia melakukan tugas dan kewajibannya sebagai bupati sesuai identitas kelIndonesiaan kita.

# Empat Pilar TAK UBAH KEDUDUKAN Pancasila

**Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang diwajibkan MPR tidak mengubah kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Keempat pilar itu tidak digeneralisir memiliki kedudukan yang sama, tetapi eksplisit sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa.**

**P**enyebutan Pancasila sebagai salah satu pilar dari empat pilar kebangsaan MPR, yang secara formal dicantumkan dalam Pasal 34 ayat (3b) UU Parpol digugat sejumlah warga negara yang tergabung dalam Masyarakat Pengawal Pancasila Jogja, Solo dan Semarang (MPP Joglosemar) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka keberatan dimasukkannya Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan. Bunyi pasal yang digugat adalah parpol wajib mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

Mereka menilai penempatan Pancasila sebagai pilar merupakan kesalahan fatal karena Pancasila telah disepakati para pendiri bangsa sebagai dasar negara (*philosophie grondslaag*) dalam Pembukaan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan tersebut dengan memutuskan membatalkan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. “Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU

Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis 4 April 2014.

Lalu kenapa MPR masih menggunakan frasa empat pilar tersebut? Ternyata, penggunaan frasa empat pilar itu masih boleh digunakan sesuai hasil diskusi MPR dan MK di Perpustakaan MPR, Senin (2/3/2015). Pada diskusi ini, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ahmad Basarah beserta Ketua MK Arief Hidayat berbagi mengenai bagaimana akhirnya istilah empat pilar bisa digunakan kembali untuk mensosialisasikan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI



:: mpr.go.id

**DISKUSI:** Ketua MK dan Ketua Badan Sosialisasi MPR



**BUKA PUASA:** Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama Ketua DPD, Ketua MK dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat acara buka puasa bersama Presiden RI di Istana Negara, Selasa, 14 Juni 2016

Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MRR RI, NKRI sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Penggunaan frasa ‘empat pilar’ dalam program MPR yakni ‘Sosialisasi empat pilar MPR RI’ dinilai tak bertentangan dengan putusan MK. Ketua Badan Sosialisasi MPR, Ahmad Basarah, menyatakan hal tersebut sesuai berdiskusi dengan Ketua MK.

Ketua MK Arief Hidayat mengamini pernyataan Basarah. Menurutnya, sosialisasi empat pilar yang dilakukan MPR tak ubahnya seperti yang dilakukan MK dalam program sosialisasi pendidikan Pancasila dan konstitusi. Menurut Ketua MK, penggunaan empat pilar masih dapat digunakan dalam program MPR dan tak bertentangan dengan putusan MK.

Ketua Badan Sosialisasi MPR RI mengatakan putusan MK memang telah membatalkan frasa ‘empat pilar’. Namun, putusan itu merujuk pada permohonan uji materi UU No.2 Tahun 2011 tentang Parpol. Sementara, MPR menjalankan sosialisasi merujuk pada UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Akhirnya, Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI mengambil jalan tengah dengan tidak lagi mempergunakan istilah “Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara”, dan menggantinya dengan istilah “Sosialisasi Empat Pilar MPR RI”.

Yang terpenting, tegas Ketua MPR, sosialisasi empat pilar tersebut tidak mereduksi atau mengubah kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara aktif ikut mendukung program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara).

Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting dilakukan, tidak hanya oleh MPR RI tetapi membutuhkan kerja sama dan peran aktif seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali. Dia mengatakan, kesadaran dari dalam diri setiap orang atas pentingnya nilai-nilai luhur bangsa, akan membangkitkan karakter bangsa yang sesungguhnya cinta pada negara dan bangsanya.

■ mtik/bh - TokohIndonesia.com

# METODA KREATIF Sosialisasi Empat Pilar

Ketua MPR Zulkifli Hasan berulang kali menegaskan bahwa sosialisasi Empat Pilar adalah kewajiban seluruh elemen bangsa. Untuk itu, MPR membuat metoda-metoda sosialisasi kreatif serta mendorong praktek dalam kehidupan keseharian, baik di lingkungan instansi pemerintahan, perusahaan negara dan swasta, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya. Dengan berbagai metoda itu, diharapkan pemasyarakatan empat pilar kebangsaan akan menjadi gerakan nasional, dari, oleh dan untuk setiap warga negara Indonesia.

**G**erakan reformasi yang bergulir pada 1998 memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Selain berdampak positif, juga berdampak negatif. Salah satu dampak negatif pasca reformasi adalah nyaris tercabutnya Pancasila dari bumi Indonesia. Mata pelajaran Pancasila yang sebelumnya terdapat dalam kurikulum nasional dihilangkan. Disorientasi

terjadi di elemen masyarakat. Mereka berjalan sendiri-sendiri dengan kepentingannya masing-masing. Sementara kepentingan bangsa dan negara ditinggalkan begitu saja.<sup>1</sup> Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah mengaki-

<sup>1</sup> Ketua Badan Sosialisasi MPR Achmad Basarah usai mengikuti rapat evaluasi akhir tahun pelaksanaan sosialisasi empat pilar tahun 2015, Rabu malam (2/12/2015)



TOT: Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan pengarahan kepada peserta TOT (Training of Trainers) Lampung, Minggu, 10 April 2016



FGD: Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka acara FGD (Focus Group Discussion) sistem perencanaan pembangunan (GBHN) di Yogyakarta, 15 April 2016

batkan perubahan yang signifikan atas sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diberi amanah (UU No 17 tahun 2014) untuk memasyarakatkannya. MPR menempuh berbagai metoda, antara lain seminar, diskusi dan tatap muka dengan berbagai elemen masyarakat, training of trainer kepada para dosen dan pejabat instansi, outbond dan bela negara kepada mahasiswa, lomba cerdas cermat dan perkemahan kepada para pelajar, dialog interaktif, sosialisasi melalui media cetak dan kelompok masyarakat, bahkan juga dengan pementasan seni dan penerbitan novel.

Jauh berbeda dengan metoda dan pola penataran P4 yang dulu dilakukan pada era pemerintahan orde baru yang terkesan berupa indok-

trinasi. Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR, dilakukan dengan kreatif, kontekstual dan penuh dinamika perdebatan (diskusi) yang menyoroti berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Contohnya, dalam kegiatan sosialisasi melalui metoda training of trainers (pelatihan kepada pelatih), yang dimaksudkan untuk mempersiapkan (melatih) narasumber kompeten (pelatih) yang akan menjadi ujung tombak pemasyarakatan dan implementasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kepada para peserta diberikan berbagai wacana dan permasalahan bangsa dan diberi kesempatan mendiskusikannya dan mencari solusi terbaik yang dipresentasikan



SOSIALISASI 4 PILAR: Ketua MPR Zulkifli Hasan pada acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dengan dengan Pengurus Daerah Muhammadiyah Solo, Selasa, 10 Mei 2016.

pada akhir sesi.

Kegiatan ToT ini diawali dengan *pre test*, dilanjutkan metode penyampaian materi (ceramah dan tanya jawab), diskusi kelompok, dan simulasi presentasi materi empat pilar, dan diakhiri dengan *post test*. Dari hasil tes (*pre and post test*) diketahui bagaimana tingkat pemahaman peserta tentang empat pilar kebangsaan. Dalam ceramah penyampaian materi dibuka tanya jawab kreatif dan kritis. Dalam diskusi kelompok selalu berlangsung lebih seru, membahas berbagai masalah, misalnya, korupsi dan ketimpangan pembangunan.

Seperti kegiatan pelatihan untuk pelatih (*training of trainers/ToT*) yang diikuti sekira 100 dosen perguruan tinggi swasta dan negeri se-Jawa Tengah, Sabtu, 23 April 2016,<sup>2</sup>

<sup>2</sup>ToT sosialisasi Empat Pilar soroti ketimpangan pembangunan nasional; KBN Antara: <http://www.antarane.ws.com/berita/556941/tot-sosialisasi-empat-pilar-soroti-ketimpangan-pembangunan-nasional>

yang pada sesi diskusi kelompok antara lain menyoroti ketimpangan dalam pembangunan nasional berlangsung seru. Pada sesi diskusi kelompok, masing-masing anggota kelompok memiliki argumentasi kuat masing-masing. Anggota MPR RI yang ikut dalam kelompok hanya sebatas sebagai obervator, memperhatikan dan memberi solusi jika ada kebuntuan diskusi, namun semua keputusan diserahkan kepada peserta diskusi sehingga diskusi berjalan dengan baik.

Dalam dikusi itu para dosen menilai pemerintah cenderung masih memanjakan kota dan meminggirkan daerah dalam kuantitas dan kualitas pembangunan, seperti infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan. Juga menyoroti para pejabat dan elite pemerintahan yang sering mempertontokan hal-hal yang tidak pantas, seperti saling memfitnah, menghujat atau saling baku hantam. Padahal, pejabat dan

elite pemerintahan adalah garda terdepan dalam implementasi nilai-nilai luhur bangsa.

Diskusi kelompok lainnya menyototi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Mereka menilai banyak masyarakat memperlakukan sakralnya Pancasila. Bahkan, ada yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi menurut persepsi masing-masing, sehingga forum membahas ideologi bangsa dan negara perlu terus diperkaya.

Juga mendiskusikan Pancasila dalam era globalisasi. Pancasila yang dinilai sangat terbuka mampu sebagai perekat perbedaan yang sangat kompleks. Pancasila juga dapat dijadikan parameter sehingga apa yang masuk harus sesuai dengan nilai-nilai yang mencerminkan bangsa dan negara Indonesia.

Demikian pula metode outbound kepada mahasiswa. Metode outbound ini bertujuan memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada mahasiswa mengenai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai Empat Pilar di lingkungannya. Juga ingin membentuk generasi muda yang kreatif, profesional, serta menumbuhkan sikap kepemimpinan dan keberanian dalam mengambil keputusan

Demikian pula dalam penyelenggaraan metode Lomba Cerdas Cermat (LCC) berbangsa dan bernegara, dinilai merupakan metode untuk mempermudah sosialisasi empat pilar berkebangsaan dan bernegara kepada pelajar. Dan dengan cara ini ternyata lebih mudah diserap oleh pelajar, jika dibandingkan hanya



FGD: Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka acara FGD di Yogyakarta

sebatas ceramah di kelas.

MPR juga merangkul Kwarnas Pramuka untuk menyelenggarakan Perkemahan 4 Pilar dalam rangka menanamkan pengetahuan empat pilar, sikap kemandirian dan kepemimpinan kepada pramuka. Pramuka dianggap sebagai sasaran sosialisasi Empat Pilar yang sangat strategis. Karena pramuka adalah anak-anak remaja yang masih terus mencari jati diri, sehingga perlu bekal, perlu memahami, dan mendalami ideologi dan dasar negara yang merupakan jati diri bangsa.

Perkemahan 4 Pilar akan memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa kepada anak-anak pramuka dengan maksud menjaga agar mereka tidak terpengaruh oleh ideologi lain. Ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti ideologi komunisme, liberalisme, dan isme yang lainnya.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR Zainut Tauhid Sa'adi, ketika membuka Kemah Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Wisata Batu, Jawa Timur, Kamis sore 19 Mei 2016.



mpri.go.id

**BEDAH BUKU:** Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama Megawati Soekarnoputri saat menghadiri acara Seminar dan Bedah Buku Revolusi Pancasila di JCC Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2015

Metode lain adalah dialog interaktif (tatap muka) yang juga diharapkan dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme terhadap NKRI. Dialog interaktif ini selalu berlangsung hidup dengan antusias para peserta. Para peserta diberi kesempatan berbicara berkaitan dengan 4 Pilar berbangsa dan bernegara.

MPR juga melakukan sosialisasi empat pilar melalui pementasan seni. Melalui metode pementasan seni ini diyakini akan memudahkan masyarakat memahami nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, dalam mempersiapkan acara pementasan seni, masyarakat diajak bergotong-royong. Dengan bergotong-royong, masyarakat telah mengimplementasikan Pancasila. Kemudian, kehadiran dan kebersamaan dalam menyaksikan pentas seni tersebut juga mengaktualisasikan semangat persatuan.

Novel juga merupakan salah satu varian kegiatan MPR untuk memu-

blikasikan tentang nilai-nilai Empat Pilar MPR. Novel merupakan cara yang sangat bagus dan relevan untuk membumikan nilai-nilai Empat Pilar. Penulis melalui karya novelnya bisa menjadi salah satu dari banyaknya metode sosialisasi Empat Pilar. “Novel yang memiliki segmen anak muda merupakan media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan moral tentang ke-Indonesia-an, juga memberi kesadaran kepada masyarakat tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Kepala Biro Humas Setjen MPR Ma’ruf Cahyono.<sup>4</sup> Diharapkan, semakin banyak penulis yang karyanya memunculkan pesan-pesanmoral untuk memperkuat karakter bangsa.

■ mtik/bh - TokohIndonesia.com

<sup>4</sup> Kepala Biro Humas Setjen MPR Ma’ruf Cahyono di sela-sela bedah buku di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (14/9/2015)



mpri.go.id

Ketua MPR Zulkifli Hasan dan pimpinan MPR lainnya pada Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR Tahun 2016

# Bersatu, Bersatu, Bersatu

Pidato Ketua MPR-RI Dr. Zulkifli Hasan, SE, MM\*

**Tanpa ada persatuan tak akan lahir Indonesia. Tanpa persatuan tak akan bertahan Indonesia hingga berbilang abad ke depan. Tanpa persatuan tak akan ada kemajuan. Tanpa persatuan tak akan ada keadilan dan kemakmuran bersama. Bersatu, bersatu, bersatu. Itu yang dibutuhkan dari dulu, kini, esok hari, hingga seterusnya.**

**S**esuai dengan amanat konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga negara, lembaga perwakilan dan lembaga demokrasi memiliki kedudukan penting dan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan yang diamanatkan oleh konstitusi sungguhlah mulia, yakni mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, konstitusi negara, norma hukum tertinggi yang mengatur seluruh

sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tugas yang dimandatkan oleh undang-undang juga sangatlah mulia yakni menanamkan nilai-nilai luhur dan jatidiri bangsa kepada seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Sungguh tugas yang tidaklah ringan, dan tanggung jawab yang tidaklah mudah, karena membangun karakter bangsa adalah membangun manusia seutuhnya.

Ikhtiar membumikan dan membunikan nilai-nilai luhur bangsa telah dan terus dilaksanakan MPR melalui program pemasyarakatan “Empat Pilar MPR “ yakni Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI



\* Pidato Ketua MPR-RI Dr. Zulkifli Hasan, SE, MM, pada Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR Tahun 2016, di Gedung Nusantara MPR, Selasa, 16 Agustus 2016.



Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR Tahun 2016 di Gedung Nusantara, Selasa, 16 Agustus 2016

Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, agar dipahami, dihayati dan diamankan oleh seluruh komponen bangsa dan setiap generasi.

### Dialog Proklamator

Rabu, 17 Agustus 2016, Indonesia berusia 71 tahun. Saat itu, atas nama bangsa Indonesia, Sukarno dan Hatta memproklamkan lahirnya sebuah negara baru: Indonesia.

Makin sulit saja kita menemukan saksi hidup yang hadir pada peristiwa bersejarah itu. Karena itu, ada baiknya kami nukilkan kisah proklamasi tersebut sebagaimana dituturkan Bung Karno:

“Proklamasi itu pendek saja, pernyataan singkat yang tidak menggetarkan perasaan, pernyataan ini tidak dipahatkan di atas perkamen dari emas. Kalimat-kalimat ini hanya digoreskan pada secarik kertas dari buku tulis anak sekolah. Aku menyobeknya selem-

bar dan dengan tanganku sendiri menuliskan kata-kata proklamasi di atas garis-garis biru itu.”

Bung Hatta juga memiliki kisah tentang pembuatan teks proklamasi. Bung Karno meminta Bung Hatta saja yang membuatnya. “Bahasanya saya anggap yang terbaik,” kata Bung Karno. Lalu Bung Hatta menjawab, “Lebih baik Bung menuliskan, saya mendiktekannya.”

Dialog dua proklamator ini demikian manis untuk dikenang, demikian syahdu untuk direnungkan. Mereka saling menghormati, saling mengetahui peran dan kelebihan masing-masing. Mereka saling melengkapi, menyatu dan bersatu.

Keduanya benar-benar menggambar dan mewakili suasana kebatinan seluruh rakyat. Tanpa ada persatuan tak akan lahir Indonesia. Tanpa persatuan tak akan bertahan Indonesia hingga berbilang abad ke depan. Tanpa persatuan tak akan ada kemajuan. Tanpa persatuan tak akan ada keadilan dan kemakmuran bersama. Bersatu, bersatu, bersatu.



mp.r.go.id

Ketua MPR Zulkifli Hasan dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya foto bersama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Itu yang dibutuhkan dari dulu, kini, esok hari, hingga seterusnya.

Tapi, mari kita bertanya pada diri masing-masing. Apakah semangat persatuan itu masih ada? Jawabannya jelas: Masih. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga merasa waswas. Kita selalu dihinggapi kekhawatiran lepasnya lagi sebagian wilayah kita seperti Timor Timur dan Sipadan-Ligitan di masa lalu.

Perlu kita camkan, persatuan dalam makna yang luas tak hanya menyangkut keutuhan wilayah, tapi juga persatuan dalam memperjuangkan kepentingan nasional di bidang ekonomi. Kita harus bersatu dalam soal ekonomi dalam konteks hubungan antarbangsa maupun antar kita sendiri.

### Reformasi dan Demokrasi

Tanpa terasa reformasi telah berjalan 18 tahun. Banyak kemajuan yang telah dicapai: Otonomi Daerah, Pemilu dan Pilpres langsung serta Pemilihan Kepala Daerah. Reformasi membuka jalan bagi siapapun untuk

menjadi apapun. Banyak lagi yang telah kita capai dan dunia internasional pun mengakui capaian ini

Namun, Demokrasi tak hanya prosedur dan kelembagaan tapi juga harus ada etika dari pelaku-pelakunya. Harus ada penghayatan dan kesadaran yang kuat agar demokrasi menjadi indah dan bernyawa. Agar ada batas dan pertanggungjawaban kepada publik. Jangan sampai politik sebagai teknik mengalami kemajuan, tapi politik sebagai etik mengalami kemunduran.

Demokrasi juga menuntut gagasan dan idealisme. Apakah idealisme itu masih menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Jawabannya mantap: Masih. Gagasan dan idealisme dibutuhkan agar selalu ada pembaruan dan pencerahan yang terus menerus. Agar kita tak terjebak pada pragmatisme, hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan jangka pendek. Semuanya berporos pada kepentingan nasional, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kelompoknya.

## Kesenjangan

Kita tahu kesenjangan ekonomi kita demikian lebar. Masalah disparitas ini bukan semata soal mentalitas manusia tapi memang karena ada problem-problem struktural. Hal itu hanya bisa diubah dengan intervensi negara. Pemerintah bisa memberikan arahan, membuka jalan, menyiapkan jalur, bahkan menyiapkan sarananya. Ini akan sangat membantu pelaku usaha kecil dan menengah, maupun pemula.

Persatuan di bidang ekonomi adalah kebutuhan mendesak bangsa Indonesia. Jangan biarkan kantong-kantong usaha kecil terus tergusur. Jangan biarkan tenaga kerja kita dipinggirkan tenaga kerja asing, apalagi di saat masalah pengangguran masih tak terselesaikan.

Perbedaan pendapat tak akan memicu ledakan, tapi perbedaan pendapatan yang menganga lebar akan menjadi celah bagi magma untuk menyembur dan kemudian meledakkan gunung sosial kita. Solidaritas sosial mudah roboh jika cita-cita kebajikan dan kesejahteraan bersama tak terpenuhi.

Bila demokrasi hanya memberi keuntungan bagi segelintir orang, seraya meminggirkan sebagian besar orang, sekuat apapun rasa persatuan kita pada akhirnya bisa pecah. Kemiskinan dan kesenjangan adalah lahan subur bagi fundamentalisme, terorisme dan radikalisme.

## Pembangunan Karakter

Sebuah jajak pendapat menyentak kesadaran kita. Ternyata sikap positif seperti berani mengakui kesalahan, jujur dan amanah, serta tunduk pada aturan hukum

belum sepenuhnya menjadi karakter masyarakat Indonesia.

Jajak pendapat itu juga menemukan makin lemahnya persatuan, tergerusnya perilaku bermusyawarah, melemahnya kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, makin jauhnya perwujudan sila kelima Pancasila dan belum memadainya peran negara dalam mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ini membuktikan ada problem serius pada pembangunan karakter elite dan masyarakat kita. Ada kesenjangan antara realitas dan cita-cita. Ini akibat suburnya egoisme individual dan materialisme hedonis pada satu sisi dan keringnya aspek batin dan spiritual pada sisi yang lain. Saat ini kita menyaksikan begitu mudahnya sikap intoleran dan pudarnya nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan kita.

Sebagai bangsa majemuk kita tak boleh meremehkan kekerasan sosial dan intoleransi. Ini bisa menjadi ancaman serius dan sewaktu-waktu menjadi eskalatif.

Namun syukur alhamdulillah, berkat kerja keras pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur begitu giat dikerjakan. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara begitu gencar. Ini akan menjaga konektivitas negara kepulauan dan sebagai negara yang terbentang luas. Ini akan membuat kita menjadi mudah melakukan mobilisasi, membuat kita saling mengenal, dan menjadi jalan yang cepat bagi pemerataan ekonomi. Apalagi didukung dengan dana desa dan kredit murah.

Semoga ke depan tak ada lagi disintegrasi nasional, intoleransi, dan kekerasan sosial. Kami juga berteri-



Presiden Jokowi menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Paripurna MPR, Selasa, 16 Agustus 2016

mp.r.go.id

makasih kepada TNI dan POLRI yang telah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

### Haluan Negara

Sebagai lembaga penghimpun dan penyerap aspirasi masyarakat, MPR menangkap kuatnya kehendak masyarakat untuk menghidupkan kembali haluan negara. Dulu kita menamakannya Pembangunan Semesta Berencana dan kemudian Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ini agar kepentingan nasional kita terukur, terencana, terwujud serta tak berhenti di pidato dan pada saat kampanye saja.

Kami meyakini pentingnya haluan negara agar kekuasaan tak diselewengkan oleh selera pribadi dan kelompok serta golongan. Haluan negara menjadi rambu agar negeri ini tak mudah goyah oleh pergulatan global dan asing. Isi dan substansi haluan negara harus menegaskan bahwa sumber daya alam memberi manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Haluan negara

menjadi arah dan visi menuju bangsa produktif dan berdaya saing tinggi.

Kita diamanatkan bahwa kemerdekaan adalah pintu gerbang dan jembatan emas menuju cita-cita proklamasi. Tapi sampai kapan kita berada di gerbang dan jembatan itu? Kita butuh haluan negara yang menjadi dasar bagi kita bersama untuk mencapai cita-cita itu. Agar kita tak jalan di tempat. Agar kita tak tersesat. Agar kita tak jatuh dari jembatan itu.

Indonesia memerlukan haluan penyelenggaraan negara yang akan menjadi pedoman dasar (*guiding principles*) dan arahan dasar (*directive principles*).

Dengan segala kerendahan hati, kami mengajak: Mari kita duduk bersama untuk merumuskan haluan negara itu. Haluan negara untuk memenuhi janji kebangsaan kita : Kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 16 Agustus 2016

■ [mti.boj](http://mti.boj) - [TokohIndonesia.com](http://TokohIndonesia.com)

# Kita Butuh Haluan Negara

**Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan kita membutuhkan Haluan Negara untuk mengatasi semakin melebarnya kesenjangan sosial di negara berideologi dan berdasar Pancasila ini.**

**K**esenjangan sosial sudah semakin jomblang dan nyata. Sumber daya alam dan aset daerah umumnya hanya dikuasai segelintir orang yang dulunya menjadi sponsor saat pemilihan kepala daerah. Dia merujuk hasil suevei yang menunjukkan 1 persen penduduk menguasai 50,3 persen sumber daya alam. Sementara para petani banyak yang menjadi petani gurem karena mereka tidak memiliki lahan. Dia sangat khawatir, kesenjangan akan semakin melebar jika

negara tidak memiliki GBHN.

Zulkifli mengatakan hal ini tentu bertentangan dengan keadilan sosial bagi rakyat. Jauh juga dari kedaulatan untuk rakyat yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. “Pentingnya melihat perkembangan sistem negara kita akhir-akhir ini mengenai kesenjangan. Kita survei terakhir, 1 persen menguasai 50,3 persen, itu kesenjangan yang terlalu jauh. Di mana posisi kedaulatan rakyat? Kalau seperti itu yang berdaulat dan berkuasa rakyat itu ada di mana?”



mpri.go.id

PLENO: Ketua MPR Zulkifli Hasan pada Rapat Pleno Lembaga Pengkajian MPR, di Senayan, Jakarta, Senin, 07 September 2015



:: mpr.go.id

**KONVENSI-NASIONAL:** Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai Keynote Speech pada acara Konvensi-Nasional-tentang-Haluan-Negara di JCC, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2016, mengatakan ada kelompok masyarakat yang setuju terhadap perubahan terbatas pada UUD NRI tahun 1945. Yaitu perubahan menyangkut kembali digunakannya haluan negara. Mereka beranggapan, ketiadaan haluan negara menjadi penyebab arah pembangunan di Indonesia menjadi tidak jelas. Akibatnya, bukan peningkatan kesejahteraan, tetapi makin lebarnya kesenjangan. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarno Putra, juga tampil sebagai Keynote Speech.

kata Zulkifli Hasan.<sup>1</sup>

Zulkifli berpandangan dalam kehidupan berdemokrasi, penting kiranya ada aturan yang mengatur dan mengikat, agar seluruh pihak bisa diuntungkan dan semakin menjembatani kesenjangan. Sehingga, tegasnya, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dirasa perlu diterapkan kembali, agar ada pegangan dan aturan pembangunan segala bidang untuk jangka panjang. “Dalam demokrasi, kalau tidak ada norma kuat yang mengatur maka demokrasi itu hanya akan menguntungkan segelintir orang saja. Sama seperti pasar bebas. Pentingnya haluan negara yang mengatur dan

<sup>1</sup> Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam sambutan pada acara halal bihalal Gerakan Pemantapan Pancasila di Gedung Granadi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/7/2016). Acara ini diinisiasi Try Sutrisno dan dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mantan Menkokesra era Presiden Megawati Agum Gumelar, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto, mantan Wakil Ketua MPR AM Fatwa, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.



:: mpr.go.id



:: rml.co.id/humas mpr

**FGD:** Ketua MPR Zulkifli Hasan saat berbicara dalam acara Focus Group Discussion di hadapan puluhan peserta akademisi Universitas Sulan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Rabu, 4 Mei 2016.

menjadi pegangan bagi pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Semua fraksi di MPR dan DPD sudah sepakat,” kata Ketua MPR.

Karena itu, dia memohon dukungan dan doa, mudah-mudahan kalau semua bisa disimpulkan apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam haluan negara itu sebagai langkah awal sehingga kita punya pegangan.

Zulkifli Hasan berulang kali menegaskan harapannya agar para akademisi bersedia ‘turun gunung’ menyumbangkan ide-idenya terkait haluan negara. “Jika para pendekar (akademisi) turun tangan mudah-mudahan bisa lebih mudah. Kami menyadari banyak rakyat kecewa kepada parpol. Oleh karena itu kami ingin pendekar sakti ini bergabung agar parpol bisa menjadi lebih baik,” ujar Zulkifli Hasan.<sup>2</sup> Dia berharap haluan negara ini kalau disepakati,

sudah kembali berlaku pada MPR periode mendatang. Jadi betul-betul kami di MPR ingin yang terbaik untuk negeri ini,” kata Zulkifli.

Untuk itu MPR sudah melakukan kajian bersama puluhan lembaga perguruan tinggi yang dikemas dalam bentuk *workshop* atau *focus group discussion* (FGD) dengan mengambil tema tentang kewenangan MPR dan reformulasi perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Hasil kajian perguruan tinggi tersebut akan menjadi bahan masukan dalam perumusan GBHN.

Dalam beberapa acara *focus group discussion* (FGD) yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan perguruan tinggi tersebut antara lain membahas perbedaan GBHN dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Perbedaan mendasar yakni GBHN adalah sebuah ‘strategi ideologi pembangunan’ (bersifat ideologi), sedangkan RPJP lebih merupakan sebuah ‘strategi teknokratik pembangunan’

<sup>2</sup> Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan saat menjadi pembicara dalam acara diskusi bertema ‘Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN’ yang diadakan oleh akademisi Universitas Pancasila di Hotel Margo, Jl Margonda Raya Depok, Jawa Barat, Jumat (29/7/2016).

(bersifat teknokratis). GBHN adalah sebagai arahan bagi pembangunan nasional, sedang RPJP lebih berisi penjabaran arah pembangunan nasional yang berisi prioritas kerja program pembangunan yang bersifat 'teknokratis dan pragmatis'.<sup>3</sup>

Haluan negara, bersifat dinamis dan holistik karena dibahas setiap lima tahun oleh seluruh anggota MPR yang merupakan representasi seluruh rakyat Indonesia. Sementara RPJP cenderung statis karena berbentuk undang-undang sehingga berpotensi membelenggu perencanaan pembangunan pada pemerintahan periode berikutnya.

Kelemahan sistem perencanaan pembangunan yang berlangsung sejak era reformasi adalah dimana rencana pembangunan disusun berdasarkan visi dan misi kandidat saat masa kampanye pemilihan

presiden.<sup>4</sup> Visi dan misi itu juga disusun secara terbatas oleh tim kampanye dan tidak terlalu fokus pada bagaimana negara dibangun dalam jangka panjang. Akibatnya, rencana-rencana pembangunan dari para presiden era reformasi kerap tidak bisa berkelanjutan.

Maka berdasarkan sejumlah catatan kelemahan dalam sistem RPJP itu, munculnya pemikiran untuk melakukan reformulasi perencanaan pembangunan nasional menjadi satu hal yang wajar bahkan boleh dibilang mendesak. Sulitnya koordinasi pembangunan merupakan masalah yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di bawah sistem RPJP. Kiranya MPR kembali diberi kewenangan menyusun dan menetapkan GBHN.<sup>5</sup> Amandemen UUD terbatas tentang hal ini perlu segera dilakukan.

■ [mti.tsl - TokohIndonesia.com](http://mti.tsl - TokohIndonesia.com)

<sup>3</sup> Prof. Niki Lukviarman dalam pemaparannya pada Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Universitas Bung Hatta (UBH) di Hotel Rocky, Padang, Sumatera Barat, Kamis (16/06/2016).

<sup>4</sup> Prof. Elfindri, Ibid.

<sup>5</sup> Boy Yendra Tamin, Ibid.



**PERDAMAIAN DUNIA:** Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama sejumlah tokoh pada Hari Perdamaian Dunia, 21 September 2015 di Taman Perdamaian, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

# Harmonis, PANUTAN KELUARGA

**Dr. Hc. H. Zulkifli Hasan, SE, MM selalu berupaya membina keharmonisan dan kebersahajaan hidup dalam keluarganya. Suami dari Soraya, SPsi (menikah di Jakarta, 30 Maret 1987) ini adalah sosok suri teladan, panutan, pemimpin dan imam bagi keluarganya, terutama bagi keempat anaknya (Futri Zulya Savitri, Zita Anjani, M Farras Nugraha dan M Rafi Haikal), menantu dan cucu-cucunya. Di mata keluarganya dia suri teladan tanpa harus banyak bicara: Bersahaja!**

**D**i tengah kesibukannya, sebagai Ketua MPR (2014-2019) merangkap Ketua Umum PAN (2015-2020), serta sebelumnya sebagai Menteri Kehutanan (2009-2014), dan Anggota DPR/Ketua Fraksi PAN (2004-2009) merangkap Sekretaris Jenderal PAN (2005-2010), Zulkifli Hasan senantiasa memberikan perhatian dan mengayomi keluarganya. Betapa pun sibuknya dan larutnya malam, dia selalu berupaya pulang ke rumah dari pada menginap di hotel atau di kantor. Bagi Bang Zul, rumah merupakan tempat beristirahat dan tempat berbagi cerita dengan keluarga.

Saat punya sedikit waktu luang, Zul lebih senang mengoptimalkan waktu di rumah berkumpul dengan anak dan cucunya. Bila ada waktu lebih longgar, Zul lebih memilih mengajak anaknya jalan dan makan



Ketua MPR dan Ibu Soraya Zulkifli Hasan

bareng di luar rumah (restoran) dari pada liburan jauh ke luar kota. Sangat jarang dia mengajak keluarganya liburan jauh. Selain karena keterbatasan waktu, juga bikin repot karena harus bermalam.

Namun, saat bertugas kunjungan kerja ke luar kota, dia sangat senang bila bisa mengajak isteri dan anak, bila anaknya sedang libur. Kebersamaan dan keharmonisan dengan keluarga adalah prioritas baginya di tengah prioritas dan urgensi tugas-tugasnya. Dia memanfaatkan waktu, bak kata pepatah

'sambil menyelam minum air', mengajak anaknya liburan (membahagiakan keluarganya), tanpa menimbulkan beban tambahan bagi negara. Hal itu dilakoninya, selain karena ingin membahagiakan keluarga, juga dia memang sangat menikmati kebersamaan dengan isteri dan anak-cucunya.

Itulah yang dilakoninya saat kun-



Ketua MPR dan Ibu Soraya Zulkifli Hasan bersama keempat anak dan kedua orang tuanya, Hasan dan Siti Zaenab.

:: dok.pri

juangan kerja, ketika menjabat Menteri Kehutanan. Dia beberapa kali mengajak anaknya yang kebetulan sedang libur. Antara lain, saat ada kunjungan kerja ke taman nasional, dia mengajak anak-anaknya melihat orang utan dan lain-lain. Juga ketika ke laut, dia mengajakan anak-anaknya, sekadar untuk *diving*. Dia bahagia melihat anak-anaknya senang, bergembira. Itu sudah suatu liburan yang menyenangkan buat keluarganya.

Selain itu, sambil untuk bisa tetap menjaga kebugaran, Zulkifli selalu mengajak anak-anaknya joging bareng daripada joging sendirian. Jika tidak ada waktu untuk joging, dia main tenis atau pingpong. Kalau waktunya lebih longgar, dia olahraga sepeda, lebih senang lagi bila bisa bareng anak. Sebelumnya, dia sempat ikut fitness. Tapi karena kesibukannya semakin padat, akhir-

nya ditinggal.

Selain membangun kebersamaan dan keharmonisan keluarga, Zulkifli Hasan juga tak jemu memberi teladan kebersahajaan bagi keluarganya. Zul selalu mendidik anak-anaknya untuk menggunakan segala sesuatu menurut fungsinya. Apa adanya, tidak berlebihan. Tidak hanya sekadar untuk tidak hidup bermewah-mewah, tetapi kebersahajaan dalam sikap dan pola laku.

Simak penuturan puteri pertamanya, Putri Zulya Savitri: "Dulu waktu kecil, kalau aku dan adik-adikku minta dibelikan hadiah pasti ada tugasnya dulu, biasanya menghafal *juz amma*, membaca habis satu buku cerita nabi, akademiknya harus bagus, dan lain lain." Begitu pula saat Putri ingin mempunyai mobil, Sang Ayah mengharuskan Putri diterima dulu di ITB dan lulus les bahasa Inggris di *The British*

*Institute.*<sup>1</sup>

Juga penuturan puteranya, Farras Nugraha, “Papi termaksud orang yang *overprotective*. Jika ada salah satu orang rumah tidak terlihat, beliau langsung menghubunginya. Langsung diteleponin deh di mana dan kapan pulang.”<sup>2</sup>

Bang Zul (panggilan akrabnya) merasa beruntung karena didukung sepenuhnya oleh Ibu Soraya, isterinya yang bersahaja. Sebagai contoh, saat Zulkifli menjabat Menteri Kehutanan hingga menjabat Ketua MPR, isterinya tak pernah mau dikawal ajudan. Bila bepergian ke mana pun, jika tak ada mobil, naik bajaj pun cukup. Begitu pula jika bepergian ke luar negeri, isterinya tak mau dijemput secara protokoler.

Memang, konsekuensi sebagai

pejabat negara, Zulkifli jarang bertemu dengan anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya juga masing-masing sudah punya aktivitas. Bahkan kadang dia tak bisa sempat menyemani anaknya yang sedang merayakan ulang tahun, karena harus kunjungan kerja ke daerah. Kadang kala, dalam seminggu tidak ada waktu khusus untuk keluarga. Pada mulanya anak-anaknya protes, tapi lambat-laun anaknya bisa memahami.

Namun, bagi Zul, hal itu tidak akan mereduksi atau mendegradasi kualitas kebersamaan dan keharmonisan keluarganya. Sebab Zul yakin, anak-anaknya sudah cukup matang dengan nilai-nilai kehidupan yang dia tanamkan kepada mereka. Antara lain, ketaatan pada aturan, nilai-nilai agama, kesungguhan menguasai ilmu pengetahuan, dan jangan hidup bermewah-mewah.

Semua nilai itu, terutama nilai-nilai agama dan ilmu pengetahuan adalah harta paling berharga yang diwariskan kepada anak-anaknya. Pena-

<sup>1</sup> Zulkifli Hasan di Mata Anak Perempuannya, 15 Januari 2015; [http://www.kompasiana.com/slavika/zulkifli-hasan-di-mata-anak-perempuannya\\_54f3749a745513a02b6c767a](http://www.kompasiana.com/slavika/zulkifli-hasan-di-mata-anak-perempuannya_54f3749a745513a02b6c767a)

<sup>2</sup> Zulkifli Hasan Wajib Absen Anggota Keluarga di Rumah; [www.kompasiana.com/tokohindonesia/zulkifli-hasan-wajib-absen-anggota-keluarga-di-rumah\\_54f91318a33311f9028b4651](http://www.kompasiana.com/tokohindonesia/zulkifli-hasan-wajib-absen-anggota-keluarga-di-rumah_54f91318a33311f9028b4651)



**FAMILY:** Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Isteri Soraya tampil harmonis bersama dua puteri dan dua putaranya



:: antara

Resmikan Posyandu Meranti dan Pos PAUD Rasamala

naman nilai dan ilmu pengetahuan itu, berhasil diwariskan terutama berkat peran isterinya. Isterinyalah yang selalu mendampingi dan membimbing anak-anaknya sehingga berhasil dalam pendidikannya. Isterinya yang sarjana psikologi itu membimbing anak-anaknya, mulai dari bayi, mencari sekolah terbaik di Jakarta dan luar negeri. Bukan hanya pendidikan formal, juga les-les (kursus) nonformal, seperti tari, melukis dan musik.

Sang Isteri mendidik anak-anaknya penuh kasih sayang dan disiplin tinggi. Isterinya menegakkan aturan dengan ketat. Sebagai contoh, meski anak laki-laki, pulang malam selalu ditunggu, tidak boleh nginap di rumah teman. Anak-anaknya akhirnya terbiasa dan merasa nyaman dengan aturan itu. Karena aturan (disiplin) itu ditanamkan didasari kebersamaan dan kasih sayang: Implementasi nilai-nilai Pancasila.

## Solehah, Penolong Sepadan



Soraya, SPsi, bukan sekadar pasangan hidup (isteri) baginya, tetapi seorang isteri solehah, ibu dan penolong yang sepadan. Keberhasilannya dalam bisnis dan karier politiknya sebagai pejabat publik, pejabat negara, juga keberhasilan pendidikan anak-anaknya adalah berkat topangan Sang Isteri. Tanpa dukungan Sang Isteri, dia tidak akan bisa meraih keberhasilan itu, apalagi tidak akan bisa mampu menerima amanah menjadi pejabat negara.

Maka dia pun selalu menjaga kesetiiaannya kepada isteri, kendati sekerap dan sekuat apa pun godaan dari luar. Apalagi posisinya sebagai pengusaha sukses yang kemudian menjadi politisi dan pejabat negara. "Saya punya isteri cantik dan setia, serta anak-anak yang baik. Jadi godaan dan pikiran macam-macam

itu selalu saya tepis,” aku Zulkifli Hasan.

Apalagi bila dia ingat bagaimana gelombang perjuangannya sebagai pengusaha. Soraya selalu mendampingi dan menopangnya, terutama ketika usahanya sedang turun. Soraya sungguh berperan sebagai penolong yang sepadan baginya.

Soraya adalah ibu yang tidak saja menginspirasi suami dan anak-anaknya, juga menginspirasi banyak orang. Ibu Soraya, salah satu inisiator dari *Kids Republic (One Stop Early Learning Center)*,<sup>3</sup> kini juga

aktif dalam berbagai organisasi serta aktif dalam mempromosikan pendidikan di seluruh Indonesia. Selain aktif mengelola beberapa kafe kuliner dan restoran.

Zulkifli Hasan merasa beruntung bisa meminang Soraya menjadi isterinya. Jalinan cinta kasih mereka bermula ketika masih duduk di bangku SMA. Awal perkenalannya terbilang unik. Saat Soraya merayakan hari ulang tahun. Kala itu, Zul belum mengenal Soraya. Namun, Zul bersama teman-temannya,



**KIDS REPUBLIC: One Stop Early Learning Center**

<sup>3</sup> *Kids Republic* baru dibuka tahun 2014. Meskipun relatif baru, sudah mendapat sambutan positif dan harapan besar dari masyarakat. Hanya satu tahun setelah pembukaan, Kids Republic telah memiliki lebih dari 150 siswa di berbagai program; Pendidikan, Senam, dan Fun & Creative. Anak tidak hanya dididik (belajar) membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga dididik mengembangkan anak di semua bidang: Sosial, rohani, fisik dan intelektual. Visinya, untuk mempersiapkan pemimpin masa depan yang memiliki intelektualitas, moralitas dan spiritualitas mumpuni dengan memaksimalkan potensi usia keemasannya. Beralamat di Jl. Cipinang Bali 1 no. 5A Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13420 dan Jl. Rajawali Blok BB 9-10 Cipinang Indah II Ruko Business Park, Jakarta Timur, Tel. 021-850 2050 - 085110387444 (Mom N Jo) dan e-mail: info@kidsrepublic.co.id





**KIDS REPUBLIC: Jl. Cipinang Bali 1 No. 5A Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13420, Tel. 021-850 2050 - 085110387444**

datang kendati tidak diundang. Sebagaimana sering mereka lakoni (iseng) menghadiri acara ulang tahun orang, sekadar untuk ikut makan enak.

Eh, ternyata Soraya itu adik kelasnya di SMAN 53 Jakarta. Zul jatuh cinta. Gayung pun bersambut. Merekapun menjalin cinta kasih. Tetapi tak lama, Soraya pindah sekolah. Namun hal itu tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang apalagi putus. Bahkan semakin dekat, karena Zul kerap menjemput Soraya. Hubungan mereka berlanjut tanpa pernah putus sambung. Bagi Zul, Soraya adalah cinta pertama dan cinta terakhir.

Setelah lulus SMA (1982), Zul sudah berbisnis alat-alat rumah tangga. Satu tahun, dia sudah punya penghasilan lumayan, puluhan juta per bulan, penghasilan yang tergo-

long sangat besar kala itu. Zul pun kuliah. Dia mendaftar ke Fakultas Kedokteran UI, tapi tidak diterima. Dia ingin menjadi dokter, karena ibunya, Siti Zaenab, meninggal akibat pendarahan saat melahirkan. Ibunya hanya ditangani seorang bidan karena kala itu dokter tidak ada. Zul tak ingin hal itu tidak terjadi lagi. Maka, dia sempat kecewa, lantaran tidak diterima masuk kedokteran. Tapi kekecewaan itu tidak membuatnya berputus asa, Zul masuk kuliah di Fakultas Ekonomi, Universitas Krisnadwipayana. Dia membiayai sendiri kuliahnya.

Lulus sarjana muda (1964), Zul langsung menyunting Soraya. Mereka menikah 30 Maret 1987 di Jakarta. Akad nikah pakai adat Beta-wi, ikut keluarga isteri. Resepsi dengan tata cara internasional. Sebelum menikah, Zul sudah punya mobil dan rumah sendiri di Cipinang



**FUTRI-MUMTAZ:** Putri Zulya Savitri menikah, Sabtu, 8 Oktober 2011, dengan Ahmad Mumtaz Rais, putera ketiga Amien Rais

Indah. Namun setelah menikah, selama sepekan sempat tinggal di rumah mertua. Setelah menikah, Zul terus melanjutkan kuliah ke jenjang sarjana (S1) hingga meraih gelar (S-2) di Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

### **Pendidikan, Warisan Terbaik**

Bagi Zulkifli Hasan dan Soraya, pendidikan (ilmu pengetahuan) adalah harta warisan paling berharga dan terbaik bagi keempat anak mereka. Zulkifli dan Soraya patut berbangga, lantaran pendidikan keempat buah hatinya berhasil dengan prestasi baik.

Anak pertama (lahir 1988), Putri Zulya Savitri, lulusan Sarjana Manajemen dari Institut Teknologi Bandung, yang kemudian pada Juli

2011, telah berhasil menyelesaikan program beasiswa unggulan dan meraih gelar Master of Business dari Australian National University. Putri menikah dengan Ahmad Mumtaz Rais (Sabtu, 8 Oktober 2011), putera ketiga Amien Rais, mantan Ketua Umum PAN dan Ketua MPR.

Futri memiliki naluri entrepreneur dari sang ayah, selain menekuni bisnis waralaba kuliner di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta, juga aktif mengelola PT. Batin Eka Perkasa, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan peralatan dapur (*kitchenware*) yang didirikan sang ayah. Memang, setelah Bang Zul jadi pejabat publik, dia tidak ikut lagi mengelola perusahaannya, kini pengelolaannya sudah sepenuhnya



:: mpr.go.id

Zulkifli Hasan pada pembukaan cycling student challenge 2016

dibawah kendali anak nomor satu (Futri) dan tiga (Farras). Fitri juga aktif di organisasi sosial, ia menjadi penggagas Yayasan Enviloka “Fesyen Ramah Lingkungan” yang berbasis edukasi dan amal.

Anak kedua, Zita Anjani, MSc, lulusan Universitas Pelita Harapan. Pada 2 September 2012, menikah dengan Radyto Egi Pratama. Zita Anjani, adalah Founder dan Kepala Sekolah Kids Republic, juga penggagas Gerakan Mengajar Seribu Guru (GMSG). GMSG merupakan gerakan mengajar yang bertujuan memberikan pendidikan berkualitas pada anak usai dini dengan cara-cara modern, mengajar dengan kasih sayang tanpa adanya kekerasan dan mengedepankan diskusi dua arah

dengan presentasi.<sup>3</sup>

Anak ketiga, M. Farras Nugraha, akrab disapa Farras, telah menyelesaikan studi Computational Chemistry, University College London (UCL) dan meraih gelar Bachelor of Science. Anak keempat, M. Rafi Haikal, menekuni pendidikan di SMA Jakarta International School (JIS).

Zulkifli dan Soraya telah memiliki dua orang cucu. Cucu pertama, anak Fitri-Mumtaz Rais bernama Illiyuna Kamila Rais, yang berarti ‘buku di surga yang mencatat segala amalan baik manusia di dunia’. Cucu kedua bernama .....

<sup>3</sup> Zita Anjani, M.Sc, ketika menggelar seminar GMSG yang dihadiri ratusan guru PAUD di Aula Rajabasa Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis 17/3/2016,



**ADOK:** Majelis Penyimbang Adat Lampung menganugerahi gelar adat Adok (*adoq*, gelar kebangsawanan masyarakat Lampung) kepada Zulkifli Hasan yakni gelar Pangeran Cagar Buana dan isterinya Soraya gelar Ratu Ayu Kesuma, Sabtu, 17 Desember 2011.

Bukan hanya anak-anaknya yang menghormati Zulkifli Hasan, melainkan juga saudara-saudara dan kerabatnya, bahkan masyarakat Lampung, tanah kelahirannya. Dua adiknya, H. Helmi Hasan SE, Walikota Bengkulu (2013-2018) dan DR H. Zainudin Hasan SH, MH, MM (pengusaha) memandangnya tidak hanya sebagai seorang kakak, tetapi juga sebagai orang tua yang harus dipatuhi dan dihormati.

Bersama adik-adiknya, Zul mendirikan Yayasan Insan Cendikia Kalilanda Lampung Indonesia yang membangun sebuah sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Lampung, bernama SMA Kebangsaan. Visi SMA Kebangsaan ini adalah menjadi tempat persemaian terbaik bagi calon pemimpin berwawasan kebangsaan yang mampu memadukan iman,

ilmu, dan amal.<sup>4</sup> Zulkifli Hasan memang seorang tokoh nasional berwawasan kebangsaan yang tak pernah lupa kepada kampung halamannya.

Atas perhatian dan jasa-jasanya mengharumkan tanah kelahirannya, Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) menganugerahi gelar adat Adok (*adoq*, gelar kebangsawanan masyarakat adat Lampung) kepada Zulkifli Hasan dan isterinya Soraya. Zulkifli dianugerahi gelar Pangeran Cagar Buana dan isterinya dianugerahi gelar Ratu Ayu Kesuma. Penganugerahan Adok dilakukan dalam prosesi adat di lapangan terbuka hijau Kota Agung, Kab. Tanggamus, Lampung, Sabtu (17/12/2011).

■ mti/tsl - TokohIndonesia.com

<sup>4</sup> Visi dan Misi; [http://www.smakebangsaan.sch.id/?page\\_id=11](http://www.smakebangsaan.sch.id/?page_id=11)

# Olahraga Bela Diri

Berolah raga adalah bagian hidup dari Zulkifli Hasan. Selain demi menjaga kebugaran tubuh, dia memang gemar berolah raga, terutama olah raga beladiri. Ketua MPR dan Ketua Umum PAN itu mengajak masyarakat menjalani hidup sehat dengan berolahraga. Menurutnya, berolahraga mempengaruhi usia hidup seseorang.

**B**ang Zul menekuni olahraga bela diri Kyokushin asal Jepang yang juga berkembang di Indonesia sebagai salah satu aliran karate yang mengandalkan *full body contact*. Pada tahun 2010, dia pun dipercaya menjadi Dewan Pembina Kyokushinkan International Indonesia, dan menerima sabuk hitam kehormatan, langsung dari Kancho Hatsuo Royama, pimpinan tertinggi Kyokushinkan International Honbu dari Jepang. Kecintaannya terhadap olahraga bela diri ini karena merupakan bela diri yang jujur dengan

gerakan-gerakannya dan mengajarkan disiplin diri yang tinggi.

Bahkan bukan hanya olah raga bela diri Kyokushin yang pernah ditekuninya. Zulkifli juga menekuni olah raga bela diri yang lain, yakni Tarung Derajat, seni bela diri yang tidak berbeda jauh dari Kyokushin. Tarung Derajat adalah bela diri asli Indonesia yang berasal dari Jawa Barat.

Seni bela diri Tarung Derajat adalah ilmu, tindakan moral dan sikap hidup yang memanfaatkan kemampuan daya gerak otot, otak





Zulkifli Hassan, Ketua Umum PB Kodrat membuka Kejurnas XVI Tarung Derajat di GOR Padjadjaran Bandung, Jumat (1/11/2013)

dan nurani secara realistis dan rasional, terutama pada upaya penguasaan dan penerapan 5 (lima) daya gerak moral, yaitu : Kekuatan - Kecepatan - Ketepatan - Keberanian – Keuletan, pada sistem ketahanan dan pertahanan diri yang agresif dan dinamis pada bentuk-bentuk gerakan pukulan, tendangan, tangkisan, bantingan, kuncian, hindaran dan gerakan anggota tubuh penting lainnya yang terpola pada teknik, taktik, dan strategi bertahan dan menyerang yang praktis dan efektif bagi suatu ilmu olahraga seni beladiri.<sup>1</sup>

Saat menjabat Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, dalam Musyawarah Nasional PB Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) IV di Hotel Century, Jakarta, 2-3 April 2010, terpilih jadi Ketua Umum Pengurus Besar Kodrat periode 2010-2014. Menurut Sang Guru Tarung Derajat, G. H. Achmad Dradjat (Aa Boxer),<sup>2</sup>

terpilihnya Zulkifli adalah melalui proses penjaringan dan penyaringan calon ketua umum yang dilakukan sejak lama. Dari sekian banyak pilihan, Bang Zul dinilai sebagai orang yang saat itu paling kredibel memimpin PB Kodrat.

Dalam kepemimpinannya, Bang Zul berhasil mengangkat Tarung Derajat ke jenjang Internasional. Tarung Derajat diperkenalkan sebagai salah satu cabang olahraga dalam ekshibisi Sea Games XXVI tahun 2011 yang didukung oleh delapan negara. Bahkan menjelang Sea Games XXVII di Myanmar 2013, cabang olahraga bela diri Tarung Derajat sudah siap dipertandingkan sebagai salah satu cabang olahraga yang tetap. Namun sayang, Tarung Derajat batal dipertandingkan karena dua negara peserta (Malaysia dan Thailand) mengundurkan diri secara tiba-tiba. Kemudian, dia menyelenggarakan Kejurnas Tarung Derajat ke-XVI di Kota Bandung tahun 2013.

■ mtik/bh - TokohIndonesia.com

<sup>1</sup> Tarung Derajat; <http://www.tarungderajat-aaboxer.com/>

<sup>2</sup> Pikiran Rakyat: Menhut Calon Kuat Ketua Umum PB Kodrat, <http://www.pikiran-rakyat.com/node/110334>

# SMA Kebangsaan

## KARPET MERAH BUAT RAKYAT MISKIN

Yayasan Insan Cendikia Indonesia (YICI) yang didirikan Zulkifli Hasan bersama adik dan kerabatnya, mendirikan dan mengelola sekolah unggulan SMA Kebangsaan di desa kelahirannya, Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

**M**enteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohamad Nuh meresmikan SMA Kebangsaan tersebut, Jumat, 12 April 2013. Peresmian SMA Kebangsaan tersebut ditandai penandatanganan prasasti oleh Mendiknas dan Ketua Dewan Pembina YICI Zulkifli Hasan.<sup>1</sup>

Sekolah unggulan yang berada di jalan lintas Sumatera (Jalinsum) berjarak sekitar 10 km dari Pelabuhan Bakauheni tersebut menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu dan berprestasi. Mendiknas M. Nuh saat peresmian

menyatakan dukungan: “Sudah saatnya orang-orang miskin kita berikan karpet merah. Saya apresiasi dan mendukung Pak Menhut (Zulkifli Hasan) membangun SMA Kebangsaan.”

Zulkifli Hasan, selaku Ketua Dewan Pembina YICI mengharapkan SMA Kebangsaan dapat mencetak lulusan siswa menuju perguruan tinggi top di tanah air, seperti UI, ITB, UGM, ITB, ITS dan Unila. Zulkifli mengatakan, SMA ini akan menerima 90 siswa baru *full* beasiswa tanpa pungutan apa pun (*gratis*). “Tidak saja ilmunya bagus, tapi siswa dilatih karakter dan disiplin,

<sup>1</sup> Mendiknas Resmikan SMA Unggulan YICI, Harian Lampung Post, 13 April 2013, hal.1.



Ruang kelas teknologi informasi SMA Kebangsaan, Lampung

karena itu kami akan melibatkan TNI untuk melatihnya. Selain itu, pendidikan kejujuran dan etika berlandaskan nilai-nilai agama juga akan diberikan di SMA Kebangsaan,” kata Zulkifli Hasan.<sup>2</sup>

Zulkifli Hasan mengatakan, pembangunan SMA Kebangsaan sebagai

upaya membantu pemda menyediakan lembaga pendidikan yang berkualitas guna meningkatkan sumber daya manusia di Lamsel. “Kita berharap dengan adanya sekolah SMA Kebangsaan ini, banyak anak-

<sup>2</sup> Ibid.



anak yang tadinya putus sekolah akan dapat kembali bersekolah,” tegas Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan menegaskan, SMA Kebangsaan akan memberikan beasiswa kepada seluruh siswanya, meliputi beasiswa pendidikan, pakaian seragam, alat-alat pendidikan, dan biaya hidup selama di asrama.<sup>3</sup>

Sementara Ketua YICI Zainuddin Hasan mengatakan, SMA Kebangsaan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta iman dan taqwa (Imtaq). “Kami mempunyai komitmen dan cita-cita luhur untuk membantu mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni membentuk pribadi anak didik yang tangguh, berakhlakul karimah, cerdas dan berwawasan ke depan. Selain itu

membentuk kecakapan hidup sebagai bekal bagi diri anak untuk diaplikasikan dalam kehidupan di masyarakat,” tegas Zainuddin Hasan.<sup>4</sup> Peresmian SMA Kebangsaan itu disertai dengan pembukaan penerimaan siswa baru.

SMA Kebangsaan mengusung **Lima Misi (Panca Cita)** yakni: *Pertama*, membentuk generasi muda Indonesia sebagai calon kader pembangunan bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, kreatif, dan inovatif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Kebhinekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; *Kedua*, membangun generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, kejuangan, kearifan lokal, dan kebudayaan nasional; *Ketiga*, mengembangkan lembaga

<sup>3</sup> SMA Kebangsaan Tanggung Biaya Hidup Siswa; <http://lampung.tribunnews.com/2013/04/12/sma-kebangsaan-tanggung-biaya-hidup-siswa>

<sup>4</sup> Mendiknas Resmikan SMA kebangsaan, <http://lampost.co/berita/mendiknas-resmikan-sma-kebangsaan>

## Prasetya Alumni Angkatan I SMA Kebangsaan, Lampung, 15 Mei 2016





Sekolah unggulan berasrama (*boarding school*) SMA Kebangsaan, Lampung memberi beasiswa penuh kepada para siswanya.

pendidikan unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat, bangsa, negara dan agama; *Keempat*, menumbuhkan jiwa kewirausahaan; *Kelima*, menghasilkan lulusan berkualitas tinggi secara akademik, kepribadian, dan kesamaptaaan jasmani yang mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun tingkat internasional.<sup>5</sup>

Sistem pendidikan di SMA Kebangsaan<sup>6</sup> menggunakan Sistem Berasrama Penuh (*Boarding School*) dimana seluruh siswa, Guru dan Kepala Sekolah tinggal bersama dalam satu kampus. Kegiatan pendidikan, pembelajaran, pelatihan, dan peribadatan berlangsung sejak bangun tidur pukul 04.30 WIB hingga menjelang tidur malam pukul 22.00, setiap kegiatan sudah dijadwalkan waktu dan tempatnya, serta dibimbing oleh pembina

SMA Kebangsaan menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional 2013 dan tambahan mata pelajaran

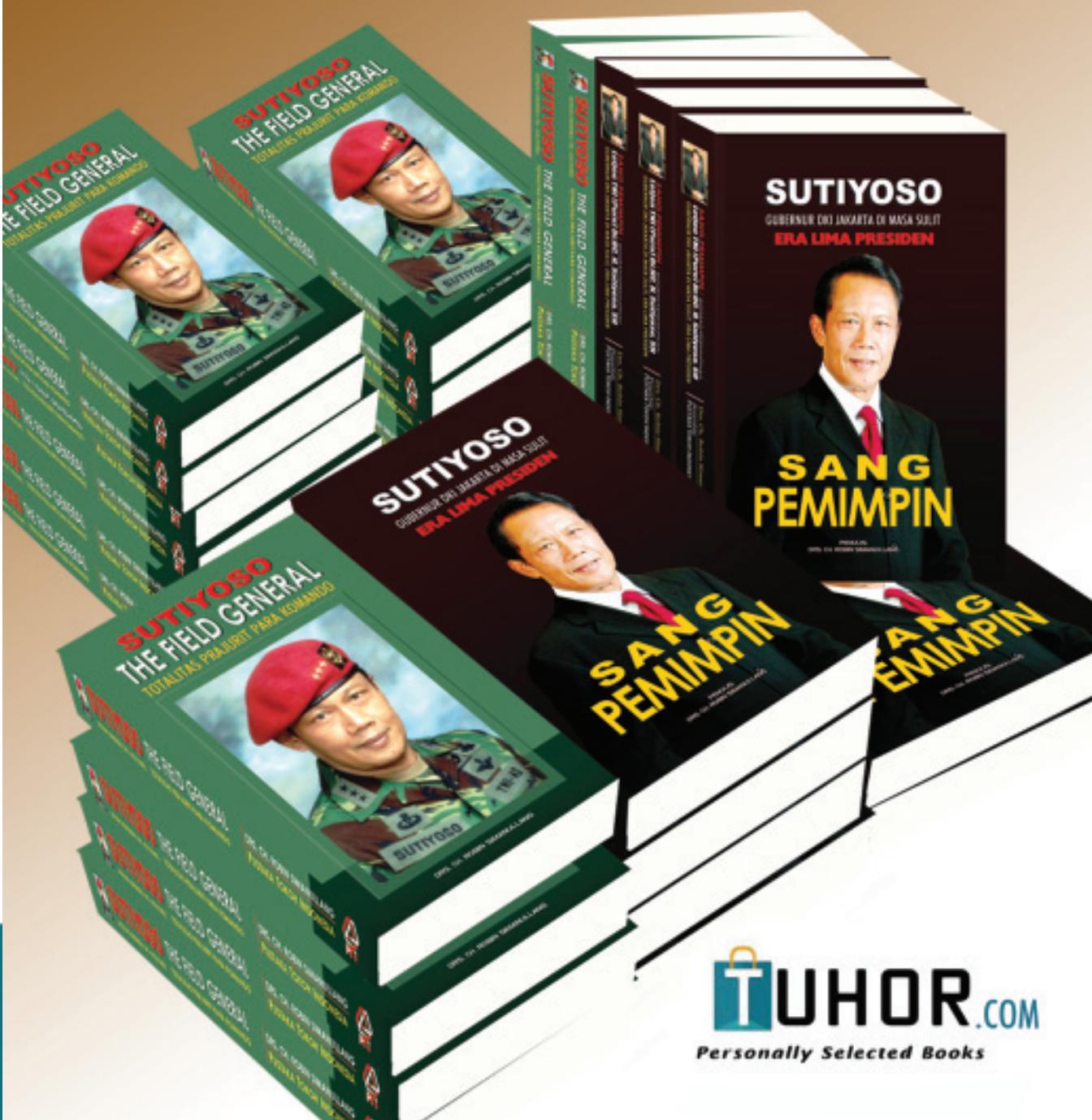
kepemimpinan, kebangsaan, bela negara, kebhinekaan, empat pilar kebangsaan, dan beberapa kegiatan, seperti tata upacara bendera, baris-berbaris, mengenal medan (*out-bond*), persami, ziarah ke taman makam pahlawan, napak tilas perjuangan pahlawan nasional, jumpa tokoh, serta extra lesson dan ekstrakurikuler.

Kegiatan belajar-mengajar difokuskan pada keaktifan dan kreativitas siswa yang ditunjang dengan lab. multimedia, lab. bahasa, lab. fisika/biologi/kimia, perpustakaan dan jaringan internet. Guru lebih berperan sebagai motivator, inspirator, konselor, dan mediator. Siswa terus dibimbing belajar hingga tuntas, pengasuhan dan pelatihan dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, saling asah, asuh dan asih. Pendekatannya adalah persuasif, edukatif, dan keteladanan dari dewan guru dan siswa senior SMA Kebangsaan (Yayasan Insan Cendekia Kalianda Lampung Indonesia).

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Sistem pendidikan, Kurikulum dan proses kegiatan belajar mengajar; <http://www.smakebangsaan.sch.id/?p=162>

# THE FIELD GENERAL DAN SANG PEMIMPIN



**TUHOR.COM**

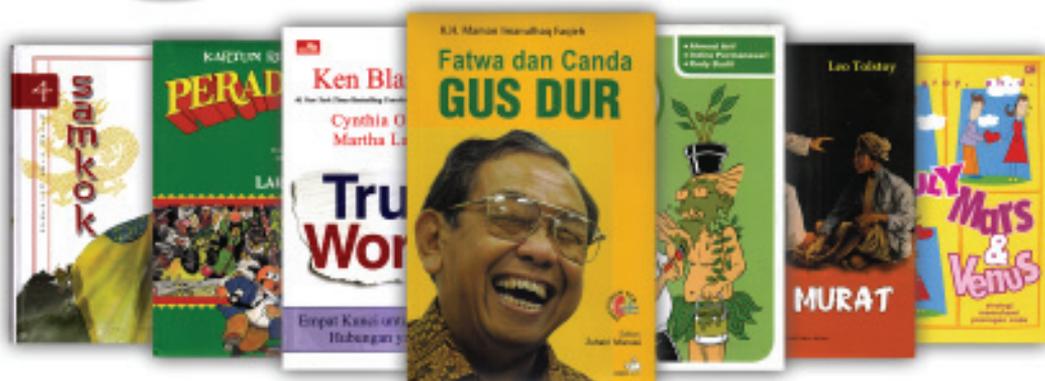
Personally Selected Books

BUKU PILIHAN

personally  
**selected**  
books

ASISTEN ANDA

Dipilih oleh  
para pencinta  
buku



Toko online buku-buku pilihan,  
buku klasik, dan buku langka.

**TUHOR.COM**

[id tuhor.id](http://id.tuhor.id)

[f tuhorcom](https://www.facebook.com/tuhorcom)

[t tuhorcom](https://www.twitter.com/tuhorcom)

[p tuhorcom](https://www.pinterest.com/tuhorcom)